

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM  
UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI  
DESA SERUMPUN JAYA, KECAMATAN PASIR PENYU, KABUPATEN  
INDRAGIRI HULU)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**Fitri Yani Oktavia**

**NPM : 177110843**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**PEKANBARU**

**2021**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kasih dan karunia Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyelesaian penulisan skripsi ini, dengan judul **“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu)”**.

Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak yang turut serta di dalamnya. Maka dengan itu penulis mengucapkan terima kasih dan rasa cinta kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mendapatkan ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik sekaligus Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis terutama pada

proses bimbingan berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan apa yang telah diarahkan.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
5. Kepala Tata Usaha dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan ini.
6. Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu yang telah membantu dalam kesuksesannya penelitian ini, termasuk dalam pemberian data dan juga dukungan lainnya.
7. Ayahanda Jumari dan Ibunda Farida tercinta yang selama ini telah memberikan dukungan dalam perkuliahan baik secara materil, doa, dan motivasi kepada saya.
8. Untuk Kakak Yurniati, Abang Ridi Mardiasyah, serta adik yang bernama Reni Puspita Sari dan Septian Ramadhan Syah serta seluruh keluarga besar dan sepupu-sepupu yang menjadi motivasi penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan Usulan penelitian ini.
9. Untuk temen seperjuangan ku Putri Solehah dengan anggota Indriyani, Nanik Widyawati, Nita Sari, Nurjannah Br,Siregar, Rahmatul Rizki, dan Dwi Risda Suryariza yang selalu mendukung dan memberi semangat untuk saya dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.
10. Buat teman-teman seangkatan Program Administrasi Publik Angkatan 2017.

Dalam penyusunan naskah skripsi ini, banyak hambatan dan tantangan yang penulis temui. Oleh karena itu, apabila pembaca menemukan kesalahan dan kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat positif dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini guna koreksi dan penyempurnaan skripsi ini kedepannya.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dari pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita bersama.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, November 2021  
Penulis  
Ttd.

Fitri Yani Oktavia

## DAFTAR ISI

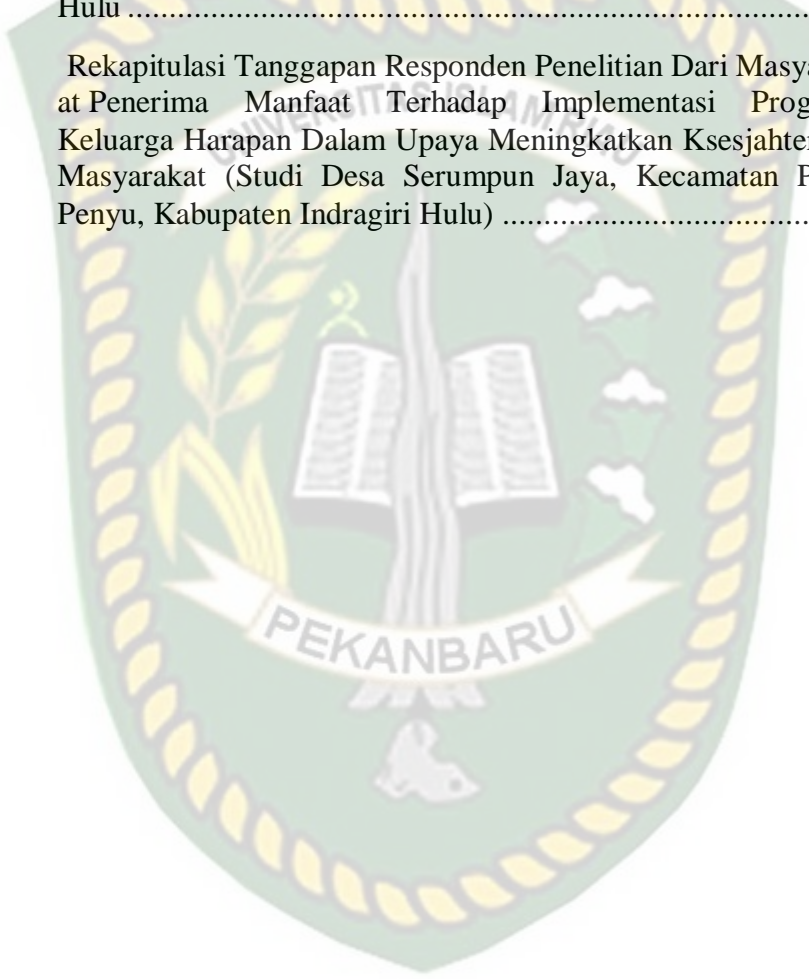
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>xii</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	19
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	19
D. Manfaat Penelitian .....	20
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	<b>21</b>
A. Studi Kepustakaan.....	21
B. Kerangka Pikir .....	43
C. Konsep operasional .....	44
D. Operasional Variabel.....	46
E. Teknik Pengukuran .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Tipe Penelitian .....	50
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Populasi Dan Sampel.....	51
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>56</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu .....	56
B. Profil Singkat Desa Serumpun Jaya .....	59
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>

A. Identitas Responden .....	66
B. Hasil Penelitian Tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu).....	70
C. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu) .....	95
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>Lampiran.....</b>	<b>103</b>

## Daftar Tabel

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
I. 1	Rincian Jumlah Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)....	11
I. 2	Daftar Jumlah Penerima Bantuan PKH Di Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu.....	14
II.1	Nama Anggota Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Di Desa Serumpun Jaya .....	15
III.1	Operasional Variabel Penelitian Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu .....	46
IV.1	Populasi Dan Sampel Penelitian Tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu .....	52
IV.2	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu .....	55
IV.3	Tingkat Pendidikan Responden Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu .....	66
V.1	Tingkat Usia Pada Responden Penelitian Dari Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Di Desa Serumpun Jaya....	67
V.2	Jenis Kelamin Pada Responden Penelitian Dari Anggota Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Di Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu .....	68
V.3	Mata Pencarian Responden Pendidikan Dari Masyarakat Penerima Program Keluarga Harapan Di Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu .....	69
V.4	Tanggapan Responden Penelitian Masyarakat Anggota Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu .....	73
V.5	Tanggapan Responden Penelitian Masyarakat Anggota Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu .....	80

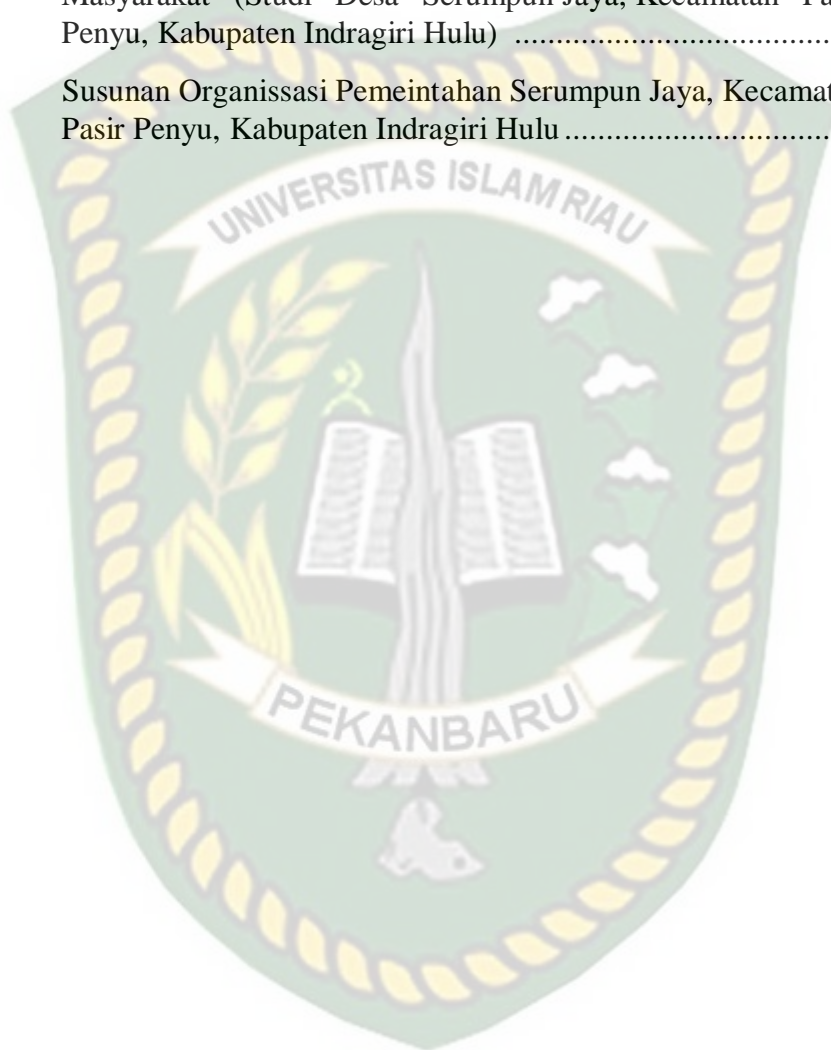
V.6	Tanggapan Responden Penelitian Masyarakat Anggota Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu .....	85
V.7	Tanggapan Responden Penelitian Masyarkat Anggota Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu .....	91
V.8	Rekapitulasi Tanggapan Responden Penelitian Dari Masyarakat Penerima Manfaat Terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Ksesjahteraan Masyarakat (Studi Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu) .....	93





## Daftar Gambar

Gambar		Halaman
II. 1	Kerangka Pikir Tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu) .....	43
IV. 1	Susunan Organissasi Pemeintahan Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu .....	61



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dikecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu .....	99
2. Daftar Kuesioner Untuk Masyarakat Penerima Manfaat .....	112
3. Daftar Nama Masyarakat Penerima Manfaat Bantuan Program Keluarga Harapan .....	116
4. Foto Dokumentasi Penelitian Tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dikecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu .....	117
5. Surat Keputusan Dekan Fisipol Universitas Islam Riau Tentang Penetapan Dosen Pembimbing .....	118
6. Surat Permohonan Rekomendasi Riset Dari Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.....	122
7. Surat Rekomendasi Riset Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau (DPMPTSP RIAU).	123
8. Surat Rekomendasi Riset Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu .....	124
9. Surat Bukti Penelitian Dari Kantor Desa Serumpun Jaya.....	125
10. Surat Keterangan Lulus Plagiasi Dari Universitas Islam Riau.....	126

## PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitri Yani Oktavia  
NPM : 177110843  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 November 2021

Pelaku Pernyataan,

Fitri Yani Oktavia

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM  
UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI  
DESA SERUMPUN JAYA, KECAMATAN PASIR PENYU, KABUPATEN  
INDRAGIRI HULU)**

**ABSTRAK**

Fitri Yani Oktavia

Kemiskinan menjadi masalah utama di berbagai negara termasuk Indonesia. Salah satu kebijakan untuk mengurangi kemiskinan adalah pelaksanaan program keluarga harapan. Berdasarkan hasil yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu berupa teknik kuisioner, teknik wawancara, teknik observasi dan dokumentasi. Fokus dari penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Subjek dari penelitian ini yaitu masyarakat penerima manfaat program keluarga harapan desa serumpun jaya, kepala desa serumpun jaya, seksi kesejahteraan dan pelayanan masyarakat serumpun jaya, koordinator kabupaten PKH, dan pendampin pkh Kecamatan Pasir Penyau.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, menunjukkan bahwa secara umum proses implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu Ini Sudah Cukup Baik Dan Cukup Terlaksana. Hal Ini dapat dilihat dari setiap tahapan proses implementasinya yang berjalan sesuai dengan mekanisme alur kerja PKH, namun dalam pelaksanaannya masing terdapat kendala-kendala yang terjadi.

**Kata Kunci:** Implementasi, Program Keluarga Harapan.

**IMPLEMENTATION OF THE HOPE FAMILY PROGRAM (PKH) IN THE EFFORT TO IMPROVE COMMUNITY WELFARE (STUDY IN SERUMPUN JAYA VILLAGE, PASIR PENYU DISTRICT, INDRAGIRI HULU REGENCY)**

**ABSTRACT**

Fitri Yani Oktavia

*Poverty is a major problem in many countries, including Indonesia. One of the policies to reduce poverty is the implementation of the family of hope program. Based on the results that the authors have done, it can be concluded that this study aims to determine the achievement of the implementation of the Family Hope Program (PKH) in the village of Serumpun Jaya, Pasir Turtle sub-district, Indragiri Hulu district. This study uses a descriptive quantitative approach. The collection technique used by the author in this study is in the form of questionnaire techniques, interview techniques, observation and documentation techniques. The focus of this research is on the factors that influence policy implementation, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The subjects of this study were the beneficiaries of the family program for the family hope of the cognate jaya village, the head of the cognate jaya village, the welfare and service section of the Cognate Jaya Community, the PKH district coordinator, and the PKH assistant in the Pasir Turtle sub-district.*

*Based on the results of existing research, it shows that in general the process of implementing the Family Hope Program (PKH) in Serumpun Jaya Village, Pasir Turtle District, Indragiri Hulu Regency is Good Enough and Enough Implemented. This can be seen from each stage of the implementation process that runs according to the PKH workflow mechanism, but in its implementation there are obstacles that occur.*

*Keywords: Implementation, program keluarga harapan.*

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalisme tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasana tertentu secara berdaya guna dan hasil guna. Siagian (Dalam Zulkifli, 2005 : 20), administrasi dan manajemen merupakan sebagai ilmu dan seni didalam pengelolaan dan mengatasi permasalahan dalam organisasi yang mana terdapat sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan manajemen terry (dalam Zulkifli, 2005: 28) mengatakan sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan -tindakan bidang proses yang khas yang terdiri dari tindakan -tindakan bidang digunakan bak ilmu pengetahuan maupun keahlian yang telah ditetapkan semula.

Sesuai dengan konsep manajemen sebagai inti administrasi yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan dengan memanfaatkan dan mengelolah sumber daya organisasi.

Tergambar pada rumusan manajemen yang dikemukakan oleh George R Terry (dalam Zulkifli, 2009 :18) mendefinisikan konsep manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan - tindakan planning, organizing, actuating, dan controlling dimana pada bidang masing - masing bidang digunakan

baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan di ikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Undang-undang dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah mempunyai peranan penting dalam membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya). Dalam kerangka proses kebijakan publik terdapat beberapa tahapan yang saling eksklusif terkait satu sama lain terkait satu sama lain, rumus atau rumusan kebijakan merupakan inti dari kebijakan publik, yaitu proses penentuan isu pokok masalah yang dihadapi sehubungan dengan formulasi itu kebijakan akan menjadi hukum bagi elemen negara.

Tahap selanjutnya adalah Implementasi kebijakan (implementasi) adalah metode yang dipilih oleh suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya dilakukan evaluasi kebijakan yang tidak semata-mata melihat kesenjangan antara

tujuan dan prestasi, tetapi melingkupi kegiatan yang dilakukan di perumusan, implementasi dan lingkungan kebijakan.

Ada dua strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan kasus kemiskinan yang terus meningkat ditengah-tengah masyarakat yaitu: Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Kedua, memberdayakan mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Rendahnya kualitas hidup penduduk miskin berakibat pada rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan sehingga dapat mempengaruhi produktivitas. Dengan kondisi seperti ini menyebabkan dapat meningkatkannya beban ketergantungan bagi masyarakat. Penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan mencakup mereka yang berpendapatan rendah, tidak berpendapatan tetap atau tidak berpendapatan sama sekali. Dengan demikian maka pengentasan dan penanggulangan kemiskinan yang diupayakan berbagai pihak diharapkan dapat mengangkat taraf hidup masyarakat miskin.

Kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan gratis bagi masyarakat miskin, hingga penyediaan kebutuhan pangan. Namun hingga saat ini permasalahan kemiskinan belum terselesaikan secara optimal, baik dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu kebijakan yang saat ini dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia adalah program penanggulangan kemiskinan terintegrasi. Salah satunya adalah PKH (Program Keluarga Harapan), PKH



merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan anggota keluarga diwajibkan untuk melaksanakan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan di bidang pendidikan dan kesehatan. .

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah program bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin (KM) atau dalam istilah Internasional dikenal dengan *Conditional Cash Transfer (CCT)*. Program Keluarga Harapan (PKH) pertama kali diimplementasikan di sejumlah Negara Amerika Latin dan Karibia seperti Meksiko, Brazil, Kolombis, Honduras Jamaica dan Nikaragwa yang dikenal dengan Program *Conditional Cash Transfer (CCT)* atau bantuan tunai bersyarat. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan pada tahun 2007.

Dari segi kebijakan sosial, PKH adalah cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga miskin. PKH yang mewajibkan RTSM/KSM untuk memeriksa kesehatan ibu hamil dan menyediakannya imunisasi dan pemantauan perkembangan anak, termasuk menyekolahkan anak, akan membawa perubahan perilaku RTSM/KSM menjadi penting kesehatan dan pendidikan. Perubahan perilaku ini juga diharapkan berdampak pada kinerja RTSM/KSM bagi anak usia sekolah. Di sisi lain merupakan tantangan besar bagi pemerintah pusat dan daerah, untuk berbenah pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin dimanapun mereka berada.

Program Keluarga Harapan (PKH) Merupakan implementasi dari UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Menteri Bidang Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan, Peraturan Menteri Bidang Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) ditetapkan sebagai peserta PKH memenuhi salah satu komponen PKH dengan kewajiban memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH. Kriteria Rumah Tangga Miskin (RTSM) pada suatu rumah tangga dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditentukan Badan Pusat Statistik adalah:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan/ kualitas rendah/tempok tanpa di plaster
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah /tembok tanpa di plaster
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung / sungai/air hujan/bukan air bersih

7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang /minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyaksatu/ dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/ tidak tamat SD
14. Tidak sanggup menyekolahkan anak sampai ke jenjang SMP (pendidikan dasar 9 tahun)
15. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas,ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Rumah tangga yang berpotensi dipilih sebagai calon peserta PKH adalah rumah tangga kategori sangat miskin dan Program Keluarga Harapan berfokus pada tiga komponen penting yaitu: (1) Kesehatan (2) Pendidikan (3) Kesejahteraan Sosial. Masyarakat yang memenuhi dari ketiga kriteria tersebut berhak mendapatkan bantuan atau menjadi peserta program keluarga harapan (PKH) dengan syarat: (1) komponen kesehatan yakni anak dengan usia dibawah 6 tahun, ibu hamil/menyusui termasuk anak penyandang disabilitas ringan/sedang, (2) komponen pendidikan yakni anak usia sekolah 6 hingga 21 tahun untuk peserta

pendidikan (SD/SMP/SMA Sederajat) (3) komponen kesejahteraan sosial yakni untuk lansia di atas 60 tahun didalam keluarga, baik keluarga tersebut memiliki atau tidak memiliki komponen kesehatan dan atau komponen pendidikan.

Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) di pusat adalah Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sedangkan pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) di daerah Kabupaten /Kota terdiri dari: Pengarah, Ketua, Koordinator Kabupaten/Kota, Pendamping Dan Operator.

Berdasarkan pedoman umum PKH, Tujuan utama PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Sedangkan Secara khusus tujuan PKH meliputi: (Pedum PKH; 201 ; 15-16)

- 1) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi peserta PKH
- 2) Meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH
- 3) Meningkatkan taraf kesehatan ibu hamil/menyusui dan anak di bawah usia 6 tahun peserta PKH
- 4) Meningkatkan kondisi ekonomi PKH.

Provinsi Riau juga menjadi salah satu pendukung pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH) melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Riau No. 67 Tahun 2015 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah ke Provinsi Riau Asuransi Kesehatan Nasional di Bab 1 mengatakan bahwa : “Program Keluarga

Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH. Untuk mendapatkan pendampingan, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang kuat terhadap upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Riau menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau pada periode september 2019 berjumlah 490,72 Ribu jiwa, tercatat persentase penduduk miskin Riau sebesar 7,08 persen dari jumlah total penduduk. Angka ini menunjukkan bahwasanya masih banyak penduduk yang memerlukan bantuan pemerintah dalam akses kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Sehingga Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan mampu menjadi program yang bermanfaat terutama masyarakat Rumah tangga sangat miskin.

Berdasarkan pedoman umum PKH, Tujuan utama PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target *Milenium Development Goals (MDGs)*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan menyatakan bahwa sasaran PKH merupakan keluarga dan / atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan / atau kesejahteraan sosial.

Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud meliputi: ibu hamil /menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun. Kriteria komponen pendidikan meliputi: anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat, anak sekolah menengah pertama / madrasah tsanawiyah atau sederajat, anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi : lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Kriteria masyarakat miskin yang menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dikabupaten Indragiri Hulu adalah masyarakat yang terdata atau terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin di Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan social. Proses pemilihan masyarakat miskin yang menerima PKH di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) Indragiri Hulu menerima data masyarakat miskin dari Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu, untuk selanjutnya pendamping melakukan sosialisasi dan validasi ke desa yang akan menerima manfaat dari program keluarga harapan. Tentunya yang akan menerima manfaat dari program ini yakni keluarga miskin yang memiliki salah satu komponen PKH yaitu kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Bantuan tunai hanya akan diberikan kepada RTSM yang telah terpilih sebagai peserta PKH dan mengikuti syarat program (pendidikan dan/atau kesehatan). Bukti kepesertaannya adalah kepemilikan kartu PKH yang memiliki fungsi

sebagai kartu atm yang tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak. Kementerian sosial melalui Bank penyalur melakukan penyaluran bantuan sosial PKH secara nontunai ke rekening atas nama keluarga penerima manfaat PKH.

Penyaluran bantuan bagi peserta yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya dilaksanakan empat tahap dalam satu tahun, sedangkan untuk kepesertaan yang ditetapkan pada tahun berjalan, penyaluran dilaksanakan dalam satu tahap. Jadwal dan pelaksanaan penyaluran bantuan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada tahun berjalan serta disesuaikan dengan kebijakan yang dibuat untuk memperlancar pelaksanaan penyaluran bantuan.

Dalam mekanisme bantuan pada Program Keluarga Harapan beragam sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi atau kakak perempuan). Selanjutnya disebut pengurus keluarga dana yang diberikan kepada pengurus keluarga perempuan ini telah terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan penerima bantuan.

Penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan secara nontunai, KPM mendapatkan kartu rekening yang mana pembukaan rekening penerima bantuan sosial PKH dilakukan oleh Bank Penyalur secara kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai perbankan. Keluarga penerima manfaat PKH berhak mendapatkan bantuan sosial PKH, pendampingan PKH, pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, dan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Keluarga penerima manfaat PKH berkewajiban untuk memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/ menyusui dan anak berusia 0 (no1) sampai dengan 6 (enam) tahun, mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 tahun dan atau penyandang disabilitas berat.

Berikut ini Dapat dilihat Jumlah bantuan yang diterima oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan, yaitu :

**Tabel 1.1 Rincian Jumlah Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)**

No	Faktor Penimbang	Indeks Bantuan (RP)
1	Bantuan Tetap PKH Reguler	550.000
2	Bantuan Tetap PKH Akses	1.000.000
3	Kategori Ibu Hamil	2.400.000
4	Kategori Anak Usia 0 s.d 6 Tahun	2.400.000
5	Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat	900.000
6	Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat	1.500.000
7	Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat	2.000.000
8	Kategori Penyandang Disabilitas Berat (PDB)	2.400.000
9	Kategori Lanjut Usia (Lansia) 70 Tahun ke atas	2.400.000

*Sumber : pedoman operasional penyaluran dana bantuan PKH*

Tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa pembayaran bantuan yang dilakukan tetap diberikan kepada peserta PKH Reguler adalah Rp. 550.000,- dan PKH Akses Rp.1.000.000,- jika peserta memiliki usia di bawah 6 tahun dan ibu hamil/menyusui maka bantuan akan ditambah Rp.2.400.000,- jika memiliki anak peserta pendidikan setara SD/Sederajat akan bertambah lagi Rp.900.000,- SMP/Sederajat akan bertambah lagi Rp.1.500.000,- dan akan bertambah lagi Rp.



2.000.000,- jika peserta memiliki anak peserta pendidikan SMA/Sederajat. Kategori penyandang disabilitas berat (PDB) an lanjut usia (Lansia) 70 tahun ke atas Rp. 2.400.000,- selain itu penerima PKH berhak mendapatkan bantuan program-program lain contohnya bantuan beras bulog, kartu Indonesia pintar dan Kartu Indonesia sehat.

Bantuan ini berupa bantuan sosial bersyarat yang diberikan dalam bentuk uang, kartu sembako, bantuan langsung hingga prakerja. Dulu penyaluranya secara tunai namun semenjak 2017 itu non tunai dalam arti transfer dari kementerian melalui rekening nasabah langsung tanpa prantara ditransfer langsung ke rekening (KPM) sesuai dengan nominal atau sesuai dengan komponen yang mereka dapatkan. seperti anak SD Rp. 900.000 1 tahun pengirimannya setiap 3 bulan sekali bulan januari, april, juli, dan oktober 4 kali dalam 1 tahun. Mengapa bantuan (PKH) ini berbeda-beda tidak sama antara A dan B, KPM 1 dan KPM 2 karna tergantung dengan komponen yang mereka. Jika mereka hanya memiliki 2 anak SD dihitung Rp1.900.000 pertahun jika 2 menjadi Rp1.800.000. Anak balita lebih besar 3 juta pertahun namun balita dikurangi menjadi 2 komponen tidak boleh lebih jika ada 3 orang yang diberi hanya 2 orang, begitu juga dengan distabilitas dan lansia Rp2.400,000 SD Rp900,000 SMP Rp1.500.000 dan SMA Rp2.000.000, Untuk menghindari penggunaan dana, misalnya uang bantuan buat kesalon, belanja, dan lain sebagainya bukan harapan atau tujuan program keluarga harapan (PKH).

Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi hak sepenuhnya bagi sasaran untuk mengubah permasalahan hidup yang dialaminya, agar tidak

terjadi penyimpangan bantuan kelembagaan yang mengawasi penggunaan dana tersebut (Kemensos RI, 2015:12). Kebijakan yang mengatur PKH adalah Permensos Pasal 43 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) keluarga yang masuk kategori miskin bisa menerima bantuan tunai dari pemerintah. Bantuan PKH ini di terima oleh Ibu Hamil/ni fas/menyusui, atau memiliki balita atau anak usia 5-7 Tahun yang belum masuk pendidikan SD, SMP, atau anak usia 15-17 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) banyak daerah-daerah yang telah tersentuh oleh program ini salah satunya adalah Kabupaten Indragiri Hulu. Kabupaten Indragiri Hulu, salah satu Kabupaten yang diberi kewenangan untuk mengurus penanggulangan masalah sosial saat ini memiliki luas 8.198.26 Km dengan jumlah kecamatan sebanyak 14 kecamatan dan jumlah penduduk sebanyak 327.141 jiwa. Kabupaten Indragiri Hulu mulai melaksanakan program keluarga Harapan pada tahun 2011. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini berasal dari anggaran pemerintah pusat yang disalurkan pada daerah melalui Dinas Sosial dan tenaga kerja Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana nama program ini adalah penanggulangan kemiskinan perdesaan dan kecamatan.

**Tabel 1.2: Daftar Jumlah Penerima Bantuan PKH di Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu**

No	Nama Desa	2019/ Orang	2020/ Orang	2021/ Orang
1	Air Molek 1	77	124	94
2	Air Molek 2	45	48	46
3	Candirejo	64	79	50
4	Batu Gajah	39	58	76
5	Kembang Harum	21	36	31
6	Tanah Merah	49	51	39
7	Tanjung Gading	50	52	44
8	Serumpun Jaya	36	36	36
9	Pasir Keranji	40	50	49
10	Petalongan	67	79	74
11	Lembah Dusun Gading	10	19	18
12	Jati Rejo	36	37	31
13	Sekar Mawar	15	20	10
	Total	549	689	549

*Sumber data Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa desa dikecamatan pasir peny sudah menjalankan program tersebut yang mana tujuan utama dari program ini yaitu untuk mengurangi angka dan memutuskan rantai kemiskinan. Untuk itu penulis tertarik untuk melihat bagaimana program tersebut dilaksanakan dan dijalankan di desa Serumpun Jaya.

Pertanian merupakan bagian terbesar di Kabupaten Indragiri Hulu, terutama di desa Serumpun Jaya ini yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang pertanian, Inilah yang menjadi penopang utama perekonomian masyarakat. Hampir sebagian masyarakat desa berprofesi sebagai petani, bahkan banyak yang hanya berprofesi sebagai buruh tani, untuk mencari tambahan penghasilan di desa Ini tergolong sulit apalagi tidak dibekali dengan pengalaman dan ilmu yang dimilikinya. Sehingga masyarakat desa memilih menjadi petani sebagai pekerjaan utamanya.

**Tabel 1.3: Nama anggota Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Serumpun Jaya Tahun 2020-2021**

No	Nama penerima Tahun 2020	Nama penerima Tahun 2021
1	Aminah	Sakinem erida
2	Ariani	Waginten
3	Bida	Yati Oktavia
4	Darmini	Mia Saripudin
5	Endawati	Eridawati
6	Ernawati	Nuraina
7	Fitri Yani	Tira asmarani
8	Hazni	Nurhamidah
9	Ilui	Murniati
10	Indri	Repi
11	Jumilah	Ilui
12	Marlina	Masmi
13	Marni	Yuliana
14	Masmiyanti	Marliana
15	Masni	Indri Novita Sari
16	Mia Saporudin	Perisa
17	Murniati	Nur Mile
18	Nuraina	Eliya Norra
19	Nurhamidah	Nurida
20	Nuridah	Masmi Yanti
21	Rani Safitri	Rina Anggraini
22	Repi	Supartik
23	Rina Anggraini	Masdi
24	Rosda	Zuminar
25	Sakinem	Sobu
26	Sobu	Marni
27	Sri Wahyuni	Jumilah
28	Suarni	Darimi
29	Sunarti	Sukarni
30	Supartik	Fitri Yani
31	Tira Asmarai	Warna
32	Tura	Erna Wati
33	Wagintin	Hazni
34	Warna	Rani Syapitri
35	Yati Oktavia	Sri Wahyuni
36	Yuliana	Tura
37	Zuminar	-

*Sumber data Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021*

Tabel diatas dapat dilihat jumlah beserta nama penerima program keluarga harapan di desa Serumpun Jaya yaitu berjumlah 37 orang pada tahun 2020 dan

pada tahun 2021 berjumlah 36 orang. Dari jumlah masyarakat yang mendapatkan program tersebut masih ada dijumpai masyarakat yang masih dikategorikan mampu dan bisa dikatakan masih mampu tetapi mereka justru mendapatkan bantuan program ini. Begitupun sebaliknya masih ada ditemui masyarakat yang lebih layak untuk mendapatkan program ini tetapi mereka justru tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Kondisi masyarakat sebelum adanya PKH dalam segi pendidikan masih sangat rendah dan ada sebagian masyarakat yang tidak mampu membiayai sekolah, dari segi kesehatan kualitas gizi pada anak dan ibu hamil belum tercukupi secara baik. Dengan adanya bantuan PKH memberikan kontribusi terhadap masyarakat Desa Serumpun Jaya karena didalam program PKH terdapat program-program yang berfungsi untuk mengentaskan kemiskinan, terutama dalam bidang pendidikan anak-anak menjadi lebih giat lagi untuk masuk sekolah karena kebutuhan perlengkapan sekolah lebih terpenuhi bagi RTSM yang menerima bantuan PKH. Selain dari program pendidikan, di bidang kesehatan program PKH juga mewajibkan ibu hamil dan nifas untuk memeriksakan kesehatan dan gizi serta ibu-ibu yang mempunyai anak balita lebih rajin untuk ikut posyandu dan imunisasi. Dengan adanya program PKH di Desa Serumpun Jaya mampu menjadikan anak-anak berprestasi, keluarga dengan kondisi kesehatan yang lebih baik dari pada sebelum adanya program PKH tersebut. Untuk lansia dan disabilitas dengan adanya program PKH ini mereka menjadi lebih terpenuhi untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan serta pakaian.

Banyak anak-anak setelah lulus SMP tidak melanjutkan pendidikannya dikarenakan keterbatasan biaya, kebanyakan dari orang tua tidak memikirkan pentingnya pendidikan untuk anak-anak mereka, karena pendidikan merupakan aspek yang paling penting bagi masyarakat. Karena melalui pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Untuk masyarakat yang menempuh pendidikan hingga SMA bahkan perguruan tinggi bisa dihitung jumlahnya. Tetapi masyarakat Desa serumpun jaya pada umumnya lebih senang melihat anak-anaknya yang masih di usia sekolah tetapi sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar, dikarenakan banyak kendala yang dihadapi, salah satunya adalah biaya. Oleh karena itu tingkat pendidikan di Desa serumpun jaya masih sangat rendah.

Salah satu sasaran dari PKH adalah mencapai pendidikan dasar untuk semua warga desa, untuk mencapai tujuan harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai serta dukungan oleh Pemerintah Desa. Salah satu tujuan dari PKH untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kepada masyarakat miskin. Di dalam Program Keluarga Harapan terdapat tujuan khusus yang dapat berguna untuk mensejahterakan masyarakat dan merubah pola pikir masyarakat menjadi lebih maju sehingga mengedepankan pentingnya pendidikan untuk anak-anaknya sehingga mereka mampu mengarahkan anak-anaknya untuk terus belajar demi masa depan yang cerah dan tidak seperti yang di alami oleh orang tuanya terdahulu.

Semua pihak yang berkaitan dengan ini diharapkan untuk bisa memberikan bantuannya terutama hal-hal verifikasi baik di fasilitas pendidikan maupun

kesehatan. Partisipasi dan peran serta dari semua pihak sangat diharapkan demi tercapainya tujuan PKH, dan diharapkan membawa manfaat untuk masyarakat Indonesia. Program Keluarga Harapan yang diharapkan mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dan membawa dampak positif untuk masyarakat Desa Serumpun Jaya terdapat program-program serta peran penting dengan di adakannya PKH di Desa Serumpun Jaya. Dengan berjalannya waktu kurang lebih 8 tahun ini terdapat masalah atau kendala yang dihadapi oleh PKH ini, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh PKH ini kurangnya kesadaran untuk mengundurkan diri dari PKH bagi mereka yang sudah mampu atau tergolong (kaya), warga yang sudah mendapatkan PKH malah tidak mau melanjutkan sekolah padahal bantuan untuk penerima PKH sampai tingkat SMA.

Dari penelitian yang dilakukan ditemui ada masyarakat yang mendapatkan bantuan dari program ini berupa uang yang seharusnya dipergunakan untuk memehuni kebutuhan sehari-hari tetapi dipergunakan untuk keperluan lain diluar kebutuhan tersebut.

Dari uraian diatas maka peneliti menemukan beberapa fenomena yaitu :

1. Kurang tepatnya sasaran dalam melakukan pendataan RSTM sebagai penerima manfaat PKH, karna masih terdapat masyarakat yang dikatakegorikan kurang mampu tetapi tidak mendapatkan bantuan tersebut, sebaliknya terdapat juga masyarakat yang dikategorikan mampu justru mendapatkan bantuan dari program tersebut. Sehingga masyarakat yang justru seharusnya lebih pantas untuk mendapatkan bantuan dari Program tersebut.

2. Penyalahgunaan dana PKH terhadap peserta penerima PKH, yang seharusnya dana tersebut untuk keperluan dibidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial tetapi malah dipergunakan untuk kegunaan diluar itu, seperti untuk membeli perabotan rumah tangga, dll.

Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti mengambil judul implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latarbelakang diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan pada penelitian ini, yaitu Bagaimana implementasi dan dampak dari Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu.

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Serumpun Jaya Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu
2. Untuk mengetahui Hambatan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Serumpun Jaya Kecamatan Pasir Peny Kabupaten Indragiri Hulu



**D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti serta kemampuan berpikir sistematis dan metodologis peneliti
2. Dapat memberikan manfaat dan ilmu baru untuk penelitian lebih lanjut terkait peran program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait Program Keluarga Harapan.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep dalam penelitian ini, penulis mengutip beberapa pendapat para ahli dan teori yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penelitian dalam memecahkan masalah dan menjadi dasar penelitian. Teori yang digunakan merupakan rangkaian yang akan dikaitkan dengan masalah tersebut :

#### 1. Konsep Administrasi

Menurut Gie (dalam Zulkifli dan Moris, 2014 : 14) Administrasi merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai mencapai tujuan tertentu. Pekerjaan pokok tersebut mencakup unsur-unsur umum administrasi dalam persepektif proses.

Adapun unsur - unsur administrasi tersebut meliputi :

- a. Organisasi (tata keragaman)
- b. Managemen (pimpinan)
- c. Komunikasi (tata hubungan)
- d. Informasi (tata keterangan)
- e. Personalia (tata kepegawaian)
- f. Material (tata pembekalan)
- g. Relasi Publik (tata humas)

Sebagian para ahli mengartikan organisasi secara sempit yaitu sebagai alat bagi seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai suatu atau sejumlah tujuan. Persepsi ini terlihat dalam definisi yang dirumuskan oleh Jones, *Organization is a tool use by people individually in group accomplish a wide variety to goals* (dalam Zulkifli dan Moris, 2014;15)

Menurut Tarmidzi dan Hendry Andry (2015;11) Administrasi memiliki beberapa unsur yang karenanya unsur - unsur ini menjadikan administrasi itu ada. Adapun unsur -unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Dua orang atau lebih
2. Tujuan
3. Tugas yang hendak dilaksanakan
4. Peralatan dan perlengkapan

Begitu juga diungkapkan Siagian administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dalam pelaksanaan yang pada umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (dalam Affifudin, 2015 ; 5).

Menurut Hadari Nawawi administrasi kegiatan atau rangkaian kegiatan proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Defiisi para ahli tentang administrasi ini sangat banyak sehingga tidak perlu lagi menulis sajian satu persatu. Karna pada prinsipnya mempunyai pengertian yang sama, yaitu :

1. Kerjasama
2. Banyak orang, dan
3. Untuk mencapai tujuan bersama.

Administrasi memiliki ruang lingkup yang luas dan tidak hanya sebatas proses ketika mengetik surat, pencatatan atau arti sempit lainnya. Dan jika diperhatikan dengan seksama, sangat terlihat bahwa administrasi itu tidak hanya hadir sebagai sebuah proses sederhana yang mudah untuk disepelekan secara legalitas. Kenapa, karena begitu spesifik pembahasan administrasi secara meluas dan mencakupi semua unsur yang ada didalamnya baik sumber daya manusianya, maupun dari sumber daya organisasinya, maupun sumber daya organisasi lainnya, dimana semua sumber daya organisasi itu disimpulkan 6M. Dimana 6M., yaitu :

- a. Man, yaitu manusia. Dalam organisasi manusia ini dikenal dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah sumber utama yang sangat menentukan keberlangsungan hidup sebuah organisasi. Karena jika sumber daya manusia suatu organisasi itu berkualitas, maka hdiup dari sebuah organisasi akan berkualitas.
- b. Money, artinya uang. Uang yang dimaksud adalah sumber kekuatan utama kedua setelah manusia. Karena segala sesuatu pergerakan di dalam organisasi juga membutuhkan finansial.
- c. Method yang artinya adalah metode atau cara. Cara yang dimaksud dalam hal ini adalah segala macam jalan, taktik, strategi dalam membuat sebuah organisasi itu menjadi sangat produktif dan berkelanjutan.
- d. Machine, yang artinya mesin. Mknanya adalah bahwa mesin ynag dimaksud merupakan perangkat-perangkat keras dalam organisasi yang membantu kelancaran beregeraknya sebuah organsiasi.
- e. Material, bahan, bahan, dalam organisasi, Peralatan yang dimaksud adalah bahan baku dan semua peralatan lunak selain mesin yang berupa perangkat keras
- f. Market, merupakan pasar, dalam organisasi pasar publik akan terealisasi dalam bentuk opini masyarakat. Sementara dalam organisasi private atau

bisnis, pasar benar-benar diartikan sebagai pasar untuk tempat terakhir dalam pemasaran produk.

Enam unsur diatas akan menjadi landasan utama untuk sebuah administrasi yang baik dalam menempatkan diri ditengah-tengah birokrasi pemerintahan secara menyeluruh maupu didalam perumusan kebijakan.

Berdasarkan penjelasan diatas menyimpulkan bahwa administrasi keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas dan komitmen tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

## **2. Konsep Organisasi**

Fokus dari administrasi yaitu organisasi dan manajemen. Organisasi dapat diibaratkan sebagai anatomi dari administrasi (struktur). Organisasi dapat dipahami sebagai tempat penyusunan dan pengaturan dari berbagai bagian sehingga merupakan kesatuan kerja sama yang mengatur untuk mencapai tujuan. Organisasi merupakan titik sentral dan tujuan aplikasinya setiap aspek administrasi. Karena keberadaan setiap aspek studi administrasi itu untuk memberikan dukungan kepada kebijakan manajerial dan operasional dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

Ada banyak definisi organisasi karena hampir setiap disiplin ilmu maupun para praktisinya membahas atau memberikan pengertian organisasi ataupun mendefinisikan apa arti organisasi dari sudut pandang mereka masing - masing. Jangan heran jika dalam sejumlah literatur mudah ditemui sejumlah definisi mengenai organisasi.

Organisasi merupakan unsur utama bagi sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai aktivitas (proses) bagi pencapaian tujuan.

Konsep Organisasi Menurut Winardi (2011; 15) adalah sebuah sistem yang berdiri dari aneka ragam elemen dan subsistem, diantara manadan terlihat bahwa masing-masing subsistem saling dapat diandalkan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan organisasi yang relevan. Menurut Gibson organisasi-organisasi merupakan entitas-entitas yang memungkinkan masyarakat mencapai hasil-hasil tertentu, yang tidak dapat dilaksanakan oleh individu - individu yang bertindak sendiri (dalam Winard, 2011: 13).

Menurut Griffin (dalam Saefullah 2005; 4) Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam suatu struktur dan cara berkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan (sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai tujuan tertentu. organisasi adalah suatu bentuk kerjasama manusia untuk rombongan tujuan bersama. Organisasi tidak lebih dari sekelompok orang berkumpul bersama di sekitar suatu teknologi yang digunakan untuk mengubah input-input menjadi barang dan jasa yang dapat dipasarkan. kumpulan orang-orang yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi tercipta beberapa orang yang bekerja bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Siagian (dalam Zulkifli, 2005: 25) merumuskan defenisi organisasi sebagai bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dan secara

formal terikat dalam rangka suatu tujuan yang ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan bawahan.

Sebagai suatu proses organisasi yang terdiri dari aktifitas kolektif dari orang-orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan tugas tertentu, pihak berwenang, mengawasi dan menyelesaikan evaluasi tugas. (Zulkifli, 2005; 26).

Sedangkan menurut Hamim (2005; 24) menjelaskan bahwa Organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok - kelompoknya harus melakukan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas - tugas yang rupa memberi saluran terbaik untuk pemakaian yang efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditentukan.

Dalam organisasi masing-masing personil atau anggota yang terlibat didalamnya diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab yang dikoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dimana tujuan organisasi tersebut dirumuskan secara musyawarah, sebagai tujuan bersama yang diwujudkan secara bersama - sama. Pentingnya organisasi sebagai alat administrasi dan manajemen dalam industri atau dunia kerja lainnya terlihat apabila bergerak tidaknya suatu organisasi kearah pencapaian tujuan sangat tergantung pada kemampuan manusia dalam menggerakkan organisasi itu kearah tujuan yang telah ditetapkan.

### **3. Konsep Manajemen**

Bagi kebanyakan orang manajemen bukan sesuatu yang asing, karena ia ada dalam kehidupan mereka sehari - hari. Bahkan dalam lingkungan kegiatan yang

paling sederhana. Mereka juga mempraktikkan apa yang mereka sebut 'manajemen' dalam kehidupan atau keseharian mereka.

Dalam pemahaman awam, apa yang sering disebut sebagai manajemen sering menunjuk atau diasosiasikan pada semua kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan dengan cara yang lebih baik dalam arti lebih efektif dan efisien. Begitu juga sebaliknya, terhadap sesuatu yang hasilnya buruk, diasosiasikan sebagai konsekuensi dari minimnya penggunaan manajemen atau buah dari kesalahan dalam manajemen.

Dalam berbagai kesempatan dan untuk berbagai tujuan penyebutan manajemen bersama dengan kata yang menempel di belakangnya sudah bukan sesuatu yang asing. Sepertinya rangkaian kata manajemen dengan kata yang mengikutinya sudah menjadi sesuatu yang sudah dan mudah dimengerti maksudnya.

Menurut Stoner (dalam Zulkifli, 2005;28) manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, dan menggunakan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

Menurut J. G. Longenecker (dalam Nawawi, 2013;11) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses kegiatan proses manajer dalam mengambil keputusan, mengkoordinasikan usaha - usaha kelompok dan kepemimpinan.

Menurut Stoner (dalam Nawawi, 2013;12) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha - usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



Jika disederhanakan manajemen sebagai suatu proses itu melihat bagaimana cara orang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan manajemen mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan seterusnya kembali pada kegiatan awal berupa perencanaan sesuatu yang kontinum.

Melalui proses itu para pemimpin (manajer) menggunakan semua sumber daya organisasi yang memiliki tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses itu keberadaan orang (sumber daya manusia) adalah sumber daya yang terpenting bagi setiap organisasi, namun para pemimpin tidak dapat mencapai tujuan secara optimal mengabaikan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya.

Menurut Soekarno (2006 ; 70) aktivitas manajemen dapat dinilai dalam aktivitas-aktivitas komponen yang termasuk:

1. Perencanaan, adalah aktivitas-aktivitas data dan informasi pemikiran untuk menentukan apa yang dicapai, di mana semuanya itu harus dijalankan, bila mana waktunya, oleh siapa-siapa saja yang harus dijalankan;
2. Pengorganisasian, tindak lanjut untuk menyambut rencana-rencana yang telah ditentukan untuk dilaksanakan;
3. Pengkoordinasian, adalah termasuk hubungan kerja secara teratur dan lancar dan berbagai macam aktivitas yang harus dilaksanakan;
4. Pengendalian, adalah mengarahkan agar seluruh aktivitas atau usaha tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan.
5. Pengawasan, adalah suatu usaha agar semua dan keputusan yang dibuat dapat dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diputuskan, dan dikomandokan.

## 6. Konsep kebijakan

Istilah kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang ketentuan, usulan-usulan dan rencana besar. Bagi para pembuat kebijakan (*policy maker*) istilah-istilah tersebut tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena menggunakan referensi yang sama.

Untuk itu Keban (2008:55) memberikan pengertian dari sisi kebijakan publik, yang dikutipnya dari pendapat Graycar, dimana menurutnya bahwa :” *public policy* dapat dilihat dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kata kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang akan diharapkan darinya, yaitu program mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan implementasinya”.

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya (iskandar, 2012).

Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek (Thoha, 2012), yakni :

- a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat.
- b. Kebijakan adalah suatu respon atau peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau kelompok pelaku memuat serangkaian program/aktivitas/tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (*stakeholders*) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu (Haerul, Akib, & Hamdan, 2016).

Pelaku kebijakan (*Stakeholders*) menurut Dunn terdiri dari pembuat, pelaksana dan kelompok sasaran kebijakan. Pembuat pelaksana kebijakan adalah orang atau organisasi yang mempunyai peranan tertentu dalam kebijakan, sebab mereka berada dalam posisi mempengaruhi baik dalam pembuatan ataupun dalam pelaksanaan dan pengawasan atas perkembangan pelaksanaannya. Sedangkan kelompok sasaran (*target group*) adalah orang, sekelompok orang atau organisasi

- organisasi dalam masyarakat yang perilaku atau keadaanya ingin dipengaruhi oleh kebijakan yang bersangkutan.

## 7. Konsep Implementasi

Dalam kerangka proses kebijakan publik terdapat beberapa tahapan yang saling eksklusif terkait satu sama lain terkait satu sama lain, rumus atau rumusan kebijakan merupakan inti dari kebijakan publik, yaitu proses penentuan isu pokok masalah yang dihadapi sehubungan dengan formulasi itu kebijakan akan menjadi hukum bagi elemen negara. Tahap selanjutnya adalah Implementasi kebijakan (implementasi) adalah metode yang dipilih oleh suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya dilakukan evaluasi kebijakan yang tidak semata-mata melihat kesenjangan antara tujuan dan prestasi, tetapi melengkapi kegiatan yang dilakukan di perumusan.

Menurut Nugroho (Arifin Tahir, 2014:55) mendefenisikan implementasi sebagai upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Menurut Arifin Tahir implementasi merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan untuk menjadi kenyataan.

Menurut Lester dan Stewart (Agustino,2006;139) Implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (*output*), maka keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan akhir (*output*) yang tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Menurut George C. Edwards (Arifin Tahir 2014;62-70) ada empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu:

a. Komunikasi

Faktor komunikasi menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Ini berarti bahwa komunikasi juga dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksanapelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Dengan demikian komunikasi harus dinyatakan dengan jelas, tepat dan konsisten.

Salah satu syarat utama agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif adalah mengetahui apa yang harus dilakukan. Sebuah kebijakan dan instruksi implementasi harus ditransmisikan kepada persone l- personel yang tepat sebelum dilaksanakan. Komunikasi semacam ini harus akurat dan harus dipahami oleh pelaksana.

Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor hanya sekedar mengetahui apa yang harus mereka lakukan tetapi pada intinya harus mempunyai pemahaman yang kompleks terhadap implementasi kebijakan tersebut.

b. Sumber Daya

Sumber daya penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagai dimaksudkan dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya atau dengan memberikan

pelayanan. Sumber daya yang tidak cukup akan berarti bahwa undang-undang tidak akan diberlakukan, pelayanan tidak akan diberikan, dan peraturan-peraturan yang layak tidak akan dikembangkan.

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan - ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personel yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

c. Sikap pelaksana (Disposisi)

Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan publik: jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para pelaksana menggunakan sedapat mungkin otoritas dalam mengimplemetasikan sebuah kebijakan. Salah satu alasan mengenai hal ini disebabkan independensi mereka terhadap pembuat kebijakan. Alasan lain adalah kompleksitas dari kebijakan itu sendiri. Meskipun cara lain pelaksana menggunakan otoritasnya tergantung dari disposisi mereka yang mengacu kepada kebijakan-kebijakan tersebut dan bagaimana mereka melihat kebijakan akan berdampak terhadap kepentingan perorangan atau organisasi mereka.

Para pelaksana tidak selalu melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. Akibatnya pembuat kebijakan sesuai sering berhadapan

dengan tugas-tugas untuk memanipulasi atau bekerja dalam lingkungan disposisi para pelaksananya bahkan membatasi otoritasnya.

Jika para pelaksana mendapatkan disposisi yang baik terhadap kebijakan tertentu, mereka cenderung melaksanakannya diluar yang telah diharapkan pembuat kebijakan sebelumnya. Tetapi ketika perilaku dan persepektif para pelaksana berbeda dari pembuat kebijakan, proses implementasi kebijakan menjadi secara tidak terbatas lebih membingungkan. Beberapa orang yang mengimplementasikan kebijakan dalam beberapa hal independen dari banyak atasan mereka yang secara langsung berpartisipasi pada awal pemberian keputusan kebijakan. Karena para pelaksana secara umum memiliki kebijakan, perilaku mereka terhadap kebijakan mungkin menghambat efektivitas implementasi kebijakan.

#### d. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia melaksanakannya, implementasi kebijakan masih terhambat oleh inefisiensi struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan kompleksitas implementasi sebuah kebijakan yang membutuhkan kerja sama dengan banyak orang. Hal ini menyebabkan terbuangnya sumber daya yang langka menutup kesempatan, menciptakan kebingungan, mengiring kebijakankebijakan untuk menghasilkan tujuan silang, dan mengakibatkan fungsi - fungsi penting menjadi terlupakan.

Dari beberapa definisi implementasi dapat disimpulkan bahwa implementasi diartikan sebagai proses penerapan kebijakan yang dirumuskan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Itu juga harus ditambahkan ke dalamnya proses implementasi sangat dipengaruhi oleh berbagai tujuan untuk dicapai dan melalui tujuan yang dirumuskan.

#### **8. Program Keluarga Harapan (PKH)**

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai peserta PKH. Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial (pedum PKH; 2016 ; 18).

Berdasarkan Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH) Pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) meliputi:

Pelaksana Program Keluarga Harapan adalah Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Personil pelaksana Program Keluarga Harapan di pusat terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga dan Pegawai non PNS dengan Ikatan Perjanjian Kerja dengan waktu tertentu (IPKWT) yang terdiri atas Tenaga Ahli dan Tenaga Operator. Tenaga dalam Direktorat Jaminan Sosial Keluarga bertugas membantu direktur dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi PKH agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan program.



Program percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, digalakan pada tahun 2007 dengan dilaksanakannya program keluarga harapan (pkh). Sebagai prioritas nasional dalam lima tahun mendatang (2010-2015) PKH pelaksanaannya dititikberatkan pada perluasan jangkauan pelayanan terhadap target RSTM dan wilayah pelaksanaan kegiatan PKH. Sesuai dengan ketentuan, salah satu strategi PKH adalah mendorong pemerintah daerah dan provinsi dan kabupaten/kota melalui Dinas Sosial masing-masing untuk menurunkan angka kemiskinan di daerah. Dengan menggunakan sistem yang mekanisme yang telah diatur di Dalam Pedoman Umum PKH 2007, pemerintah daerah dapat melanjutkan program ini terhadap RSTM peserta PKH apabila dipandang pendapatanya masih berada dibawah garis kemiskinan. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat memperluas jangkauan PKH kepada rumah tangga miskin (RTM) agar lepas dari masalah kemiskinan. Mengingat PKH adalah program proritas nasional, maka tidak hanya kementrian sosial yang harus melaksanakanya tetapi pemerintah daerah juga bisa mengembangkan dan melanjutkannya sesuai dengan kemampuan dukungan APBD.

Program keluarga harapan (PKH) yaitu suatu program yang dibentuk oleh pemerintah dalam hal untuk dapat menyalurkan bantuan tunai bersyarat kepada semua kalangan rumah tangga sangat miskin atau keluarga sangat miskin yang bisa disingkat RSTM/KSM. PKH ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga diharapkan dapat mengubah sikap, prilaku, maupun pandangan rstm/ksm itu sendiri supaya bisa dengan mudah mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Yang mana nantinya dapat diharapkan untuk

mendorong rantai kemiskinan yang terjadi disuatu wilayah. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target SDGs (*Sustainable Development Goals*).

Adapun secara khusus, tujuan dari PKH ( direktorat jenderal perlindungan dan jaminan sosial (2013:12) terdiri atas:

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, anak balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar (anak pra sekolah atau apras) dari RSTM.
2. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RSTM.
3. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RSTM.

Jumlah bantuan tunai yang dapat diterima oleh peserta PKH nominalnya bervariasi, penentuan tersebut dapat dilihat berdasarkan jumlah anggota keluarga yang dihitung menurut aturan penerimaan bantuan, baik dari sisi komponen kesehatan maupun pendidikan. Dimasa yang akan datang jumlah besaran bantuan yang diterima dapat berubah sesuai denga kondisi keluarga pada saat itu atau bila peserta PKH tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan.

Pendamping PKH dibutuhkan karena :

1. Sebagian besar RSTM/KSM mempunyai keterbatasan kemampuan dalam memperjuangkan haknya. Untuk itu dibutuhkan pendampingan, dalam membantu mendapatkan haknya yang patut mereka peroleh dari PKH.

2. Pendamping membantu tugas-tugas UPPKH mendeteksi segala permasalahan dan melakukan tindak lanjut dalam waktu yang cepat.

Pendamping PKH adalah seseorang yang direkrut dan ditetapkan oleh kementerian sosial RI untuk melaksanakan tugas-tugas pendampingan PKH, dan terikat dengan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial, Ditjen Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI. Untuk memberi jaminan dalam proses kerja dilapangan, kementerian sosial mewajibkan setiap pendamping untuk mengansuransikan diri dengan dana yang diberikan.

Secara kelembagaan, pendamping harus melaporkan kegiatan dan permasalahananya ke sekretariat uppkh kabupaten/kota dan koordinator wilayah.

Tugas pendamping meliputi :

1. Tugas pokok
2. Tugas pengembangan pendamping
3. Tugas penunjang

Pelaksana PKH di Kecamatan bertugas sebagai :

1. Bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di Kelurahan/Desa
2. Melakukan kegiatan pendamping PKH di Kelurahan/Desa
3. Memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana
4. Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH
5. Membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH
6. Melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksanaan PKH Kabupaten/Kota (Kemensos RI, 2019).

#### a. Mekanisme Penetapan Peserta

Target penerima bantuan PKH merupakan rumah tangga miskin dan terdaftar dalam data yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Adapun syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan sosial PKH adalah :

- 1) Ibu hamil/nifas/anak usia dibawah 6 tahun
- 2) Anak SD
- 3) Anak SMP
- 4) Anak SMA
- 5) Lanjut usia 60 tahun keatas
- 6) Disabilitas (lumpuh total/berat)

Program keluarga harapan meliputi tahapan-tahapan yang sangat penting.

Tahapan itu adalah :

1. Mekanisme penetapan peserta
2. Pertemuan awal dengan penerima PKH
3. Komponen bantuan PKH
4. Penyaluran bantuan PKH
5. Pembentuka kelompok

Oleh karena itu, dengan melaksanakan program-program yang ada di PKH sangat berpengaruh kepada masyarakat penerima PKH terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan juga kesejahteraan sosial.

Program Keluarga Harapan menetapkan calon peserta PKH dengan menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon peserta penerima manfaat PKH menurut daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota, dan juga kecamatan. Data tingkat kemiskinan dan kesiapan Pemerintah Daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan. Sumber data penetapan sasaran berasal dari Data Terpadu program Penanganan Fakir Miskin sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Kemensos RI, 2019).

#### b. Sanksi Bagi Pelanggar PKH

Pelanggaran merupakan segala sesuatu perbuatan berbentuk sikap, perilaku dan tindakan ketidakpatuhan masyarakat sebagai penerima PKH ataupun petugas PKH terhadap peraturan PKH.

Larangan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi :

1. Berperilaku tidak terpuji atau tercela yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat mencemarkan nama baik dan reputasi kementerian sosial
2. Menggunakan data atau informasi yang dimiliki untuk hal-hal diluar tugas pelaksanaan PKH
3. Memberikan keterangan palsu atau manipulasi data atau informasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok
4. Menyebarkan pendapat yang bersikap provokatif terkait kebijakan dan pelaksanaan PKH berupa tulisan, foto, gambar, audio, dan video di semua jenis media (Kemensos RI, 2018).

Dengan adanya sanksi bagi pelanggar PKH yaitu untuk masyarakat penerima PKH atau bahkan petugas PKH merupakan suatu penerapan dalam teori modal sosial dengan unsur *tust* kepercayaan, dan juga adanya unsur norma-norma yang mengikat dalam suatu individu atau kelompok. Untuk itu adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggar tata tertib dalam PKH ini penting untuk dilakukan agar kesalahan yang mereka perbuat akan menjadi pelajaran bagi anggota PKH yang lain untuk tidak melakukan kesalahan tersebut..

#### **8. Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa sanskerta “catera” yang berarti payung. Dalam konteks, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “catera” atau payung adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin. Sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia oleh W.J.S. Poerwo darwindo, sejahtera adalah aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala gangguan kesukaran dan sebagainya). Adapun kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup).

Kata kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “sejahtera” yang berarti aman, sentosa, makmur. Pengertian “kesejahteraan” itu sendiri adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman. kesejahteraan sosial merupakan kegiatan yang terstruktur dan terorganisir dengan baik, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti Bantuan sosial melalui pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dan tergolong kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam berbagai bidang kehidupan rumah tangga dan memenuhi kebutuhan keluarga dan anak, kesehatan, dan penyesuaian sosial.

Menurut istilah “masyarakat” dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *society* dan *community*. Dalam ilmu komunitas dan ilmu pengembangan masyarakat dalam perspektif sosiologi istilah masyarakat diterjemahkan dari kata atau konsep *community* atau komunitas. Komunitas ialah suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasi dengan kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama (*communities of common interest*), baik yang bersifat fungsional maupun yang mempunyai teritorial. Istilah *community* dapat diterjemahkan sebagai “masyarakat setempat”.

Istilah komunitas dalam batas-batas tertentu dapat menunjuk pada warga sebuah dusun (dusun atau kampung), desa, kota, suku atau bangsa. Apabila anggota-anggota suatu kelompok, baik kelompok besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama, maka kelompok tersebut dinamakan sebagai komunitas.

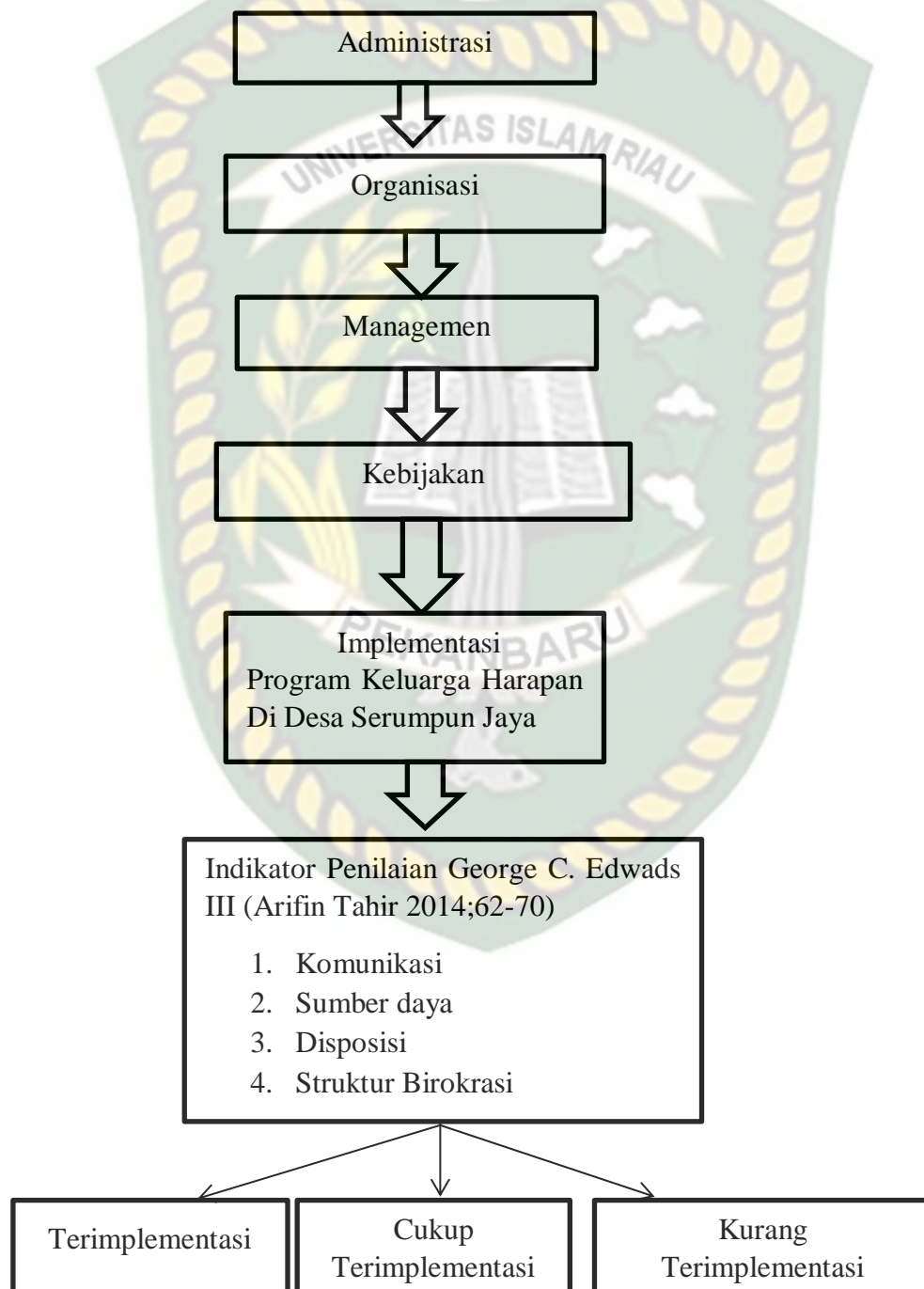
Menurut Soetomo (2011) Masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola, terorganisasi.

Sedangkan menurut Edi Suharto (2012), masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki dan biasanya satu tempat yang sama. Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi masyarakat yang menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik meliputi:

1. peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan dan perlindungan
2. peningkatan standar hidup yang bukan hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga ketersediaan lapangan kerja yang lebih banyak, pendidikan yang lebih baik, serta perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan;
3. perluasan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi individu dan bangsa secara keseluruhan.

## B. Kerangka Pikir

**Gambar 11. 2 : Kerangka Pikir Tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu)**



Sumber : Hasil Modifikasi Penulis, 2021



### C. Konsep operasional

Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk memberikan gambaran kehidupan nyata dari konsep teoritis agar mudah diterapkan dan dapat diukur sesuai dengan kenyataan. Untuk menghindari salah tafsir dalam makalah ini, perlu ditekankan terlebih dahulu konsep yang akan dioperasionalkan, diantaranya:

- a. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas dan komitmen tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Organisasi merupakan wadah untuk memfasilitasi proses kerjasama untuk pencapaian suatu tujuan tertentu.
- c. Manajemen adalah proses yang terdiri dari perencanaan. Penggerak dan pengendalian dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan suatu organisasi.
- d. Implementasi kebijakan adalah implementasi kebijakan atau undang-undang yang melibatkan berbagai faktor, program, organisasi, prosedur dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Dalam Implementasi menurut George C. Edward III yang mempengaruhi Implementasi adalah:

1. Komunikasi

Komunikasi adalah penyampaian informasi, ide-ide terhadap para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di salurkan kepada kelompok sasaran (kelompok sasaran) sehingga akan mengurangi disortasi implementasi. Keberhasilan implementasi kebijakan terjadi jika komunikasi organisasi organisasi terjalin dengan baik. Keberhasilan

komunikasi ditentukan oleh 3 indikator, yaitu: penyaluran komunikasi, konsistensi, kejelasan komunikasi.

## 2. Sumber Daya

Sumber Daya adalah populasi sumber daya pendukung sangat di dalam implementasi. Kekurangan sumber daya dalam melaksanakan kebijakan, implementasi tidak dapat berjalan efektif. Sumber Daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, informasi, sarana dan prasarana.

## 3. Disposisi

Disposisi adalah hubungan dan watak dari implementor yang disebut dengan disposisi. Disposisi menjadi konsistensi antara menentukan keputusan yang diambil keputusan dan pelaksana kebijakan. Kunci implementasi kebijakan adalah respon dari penerimaan atas kebijakan.

## 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah yang berkaitan dengan kesesuaian organisasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas maupun SOP (Prosedur Operasi Standar) dan pembagian kerja.

- f. Program (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota Keluarga RTSM diwajibkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- g. kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

#### D. Operasional Variabel

Operasional Variabel dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel, konsep uraian, variabel, indikator, dan skala yang direncanakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan akurat. Tujuan operasional variabel ini adalah menjelaskan mengenai konsep- konsep utama dalam penelitian dan pengelompokan item penelitian yang nama variabel penelitian adalah " Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu" yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 11. 1 : Operasional Variabel Penelitian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu**

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Kategori
1	2	3	4	5
Menurut Nugroho (Arifin Tahir , 2014:55) mendefenisikan implementasi sebagai upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Menurut Arifin Tahir implementasi	Implementasi Program	1. Komunikasi  2. Sumber Daya  3. Disposisi	a. Sosialisasi persyaratan penerimaan PKH b. Sosialisasi Peraturan  a. Kemampuan SDM pendukung b. Fasilitas, sarana dan prasarana yang disediakan  a. Efek disposisi b. Melakukan pengaturan birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terimplementasi</li> <li>• Cukup Terimplementasi</li> <li>• Kurang Terimplementasi</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terimplementasi</li> <li>• Cukup Terimplementasi</li> <li>• Kurang Terimplementasi</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terimplementasi</li> <li>• Cukup Terimplementasi</li> <li>• Kurang Terimplementasi</li> </ul>

merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan untuk menjadi kenyataan.		4. Struktur Birokrasi	<p>a. Melaksanakan Tanggung Jawab Sesuai Tugas yang diberikan.</p> <p>b. Melaksanakan Tugas Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tupoksinya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terimplementasi</li> <li>• Cukup Terimplementasi</li> <li>• Kurang Terimplementasi</li> </ul>
--	--	-----------------------	---	--

Sumber : Hasil Modifikasi Penulis, 2021

#### E. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Harapan Keluarga (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, maka perlu adanya teknik pengukuran yang jelas yang dapat dinilai melalui indikator berikut :

Teknik Pengukuran

Kategori ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Terimplementasi, Cukup terimplemetasi, Kurang terimplemetasi.

Adapun pengukuran indikator sebagai berikut :

Terimplemetasi : Apabila rata-rata tanggapan responden berkisar diantara 67-100%.

Cukup Terimplemetasi : Apabila rata-rata tanggapan responden berkisar diantara 34-66%.

Kurang Terimplemetasi : Apabila rata-rata tanggapan responden berkisar

diantara 0-33%.

### 1. Komunikasi

Terimplemetasi : Apabila rata-rata tanggapan responden berkisar  
diantara 67-100%

Cukup Terimplemetasi : Apabila rata-rata tanggapan responden berkisar  
diantara 34-66%

Kurang Terimplemetasi : Apabila rata-rata tanggapan responden berkisar  
diantara 0-33%

### 2. Sumber Daya :

Terimplemetasi : Apabila rata-rata tanggapan responden berkisar  
diantara 67-100%

Cukup Terimplemetasi : Apabila rata-rata tanggapan responden berkisar  
diantara 34-66%

Kurang Terimplemetasi : Apabila rata-rata tanggapan responden berkisar  
diantara 0-33%

### 3. Disposisi

Terimplemetasi : Apabila rata-rata tanggapan responden berkisar  
diantara 67-100%

Cukup Terimplemetasi : Apabila rata-rata tanggapan responden berkisar  
diantara 34-66%

Kurang Terimplemetasi : Apabila rata-rata tanggapan responden berkisar  
diantara 0-33%

### 4. Struktur Birokrasi

Terimplemetasi : Apabila rata-rata tanggapan responden berkisar  
diantara 67-100%

Cukup Terimplemetasi : Apabila rata-rata tanggapan responden berkisar  
diantara 34-66%

Kurang Terimplemetasi : Apabila rata-rata tanggapan responden berkisar  
diantara 0-33%



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Kuantitatif. Metode penelitian ini dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, menggunakan data instrumen penelitian, analisis data kuantitatif, Tipe Penelitian ini adalah tipe deskriptif, dengan metode kuantitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memahami pemahaman serta memahami dan menjelaskan Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, serta dengan jenis data menggunakan teknik angket / kuisisioner.

Metode Kuantitatif adalah sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2009: 72), untuk mendapatkan data dan keterangan yang mendukung dalam penelitian ini. Penulisan menggunakan metode angket. Prosedur masalah yang diteliti dengan menggunakan data-data yang dikumpulkan dari objek penelitian pada saat penulis mengumpulkan data lapangan.

#### B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir peny, kabupaten Indragiri Hulu, yang mana desa ini sudah menjalankan Program keluarga Harapan. Peneliti tertarik melakukan penelitian di desa

dikarenakan desa ini termasuk salah satu desa yang masyarakatnya masih kurang maju dan banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan.

### **C. Populasi Dan Sampel**

1. Populasi Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau Subjeck yang mempunyai kualitas dan kriteria tertentu yang ditentukan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (sugiyono, 2009: 73).
2. Sampel sampel adalah sebagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi tersebut, populasi besar, dan peneliti tidak mungkin belajar semuanya maka peneliti dapat menggunakan sebagian yang diambil dari populasi (sugiyono, 2009: 73).



**Tabel 111. 1 : Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Serumpun Pasir Peny, Kab. Indragiri Hulu**

No	Sub indikator	Populasi	Sampel	Presentase
1	Kepala Desa Serumpun Jaya	1	1	100%
2	Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Serumpun Jaya	1	1	100%
3	Kordinator kabupaten PKH INHU	1	1	100%
4	Pendamping Program PKH di Desa Serumpun Jaya	1	1	100%
5	Penerima Bantuan Sosial Program PKH di Desa Serumpun Jaya Tahun 2021	36	36	100%
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>

*Sumber Modifikasi penulis 2021*

Berdasarkan pertimbangan peneliti mengambil sampel aparatur desa berjumlah dua orang yaitu kepala desa serumpun jaya, kemudian Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Serumpun Jaya. Kemudian Kordinator kabupaten PKH INHU, selanjutnya Pendamping Program PKH di Desa Serumpun Jaya dan yang terkahir yaitu masyarakat penerima Pkh yang berjumlah 36 orang dikarena pada tahun 2021 jumlah masyarakat penerimanya ada 36 orang.

#### **D. Teknik Penarikan Sampel**

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pegelompokan populasi, maka untuk menentukan populasi dan sampel pada implemetasi program keluarga harapan (PKH) dalam hal ini maka digunakan penarikan teknik sensus. Teknik sensus menurut Sugiono (2012;62) yaitu semua anggota populasi dijadikan sampel. Dimana keseluruhan dari jumlah populasi dijadikan sebagai respoden

yaitu Kepala Desa Serumpun Jaya, Koordinator kabupaten PKH, Masyarakat Penerima PKH di desa Serumpun Jaya, dan Pendamping PKH di Desa Serumpun Jaya. Hal ini dikarenakan jumlah populasi yang relative sedikit sehingga mudah untuk ditemui guna mengumpulkan data dalam penelitian ini.

#### **E. Jenis Dan Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data Primer yaitu data yang dapat diperoleh langsung oleh peneliti tanpa adanya perantara. Data tersebut diperoleh peneliti langsung melalui wawancara langsung dan pengamatan langsung di lapangan.

##### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder merupakan sumber tidak langsung diperoleh dari narasumber yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap data peneliti. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari dokumentasi dan studi kepustakaan dengan melalui bantuan media cetak dan media elektronik.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Observasi**

Peneliti melakukan observasi awal untuk mengetahui mengenai informan, yaitu untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian.

##### **2. Wawancara**

Wawancara dilakukan dalam penelitian untuk mengetahui permasalahan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu.

### 3. Kuesioner

Yakni pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis yang nantinya diajukan kepada responden penelitian sesuai dengan indikator permasalahan yang akan diteliti.

### 4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bukti fisik dari penelitian ini, beberapa foto-foto penelitian dan surat-surat yang telah diperoleh selama penulis melakukan penelitian.

## **G. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif secara deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan berdasarkan kondisi yang ada dilapangan peneltian. Selanjutnya data yang didapatkan, dikumpulkan dan klarifikasi melalui kuesioer menurut jenisnya kemudian diolah tabel, setelah itu diuraikan dan kemudian diberikan pembahasan sekaligus pengujian hipotesis.

Teknik analisa ini juga suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau permasalahan yang terjadi pada objek peneltian. Suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta - fakta dilapangan untuk kemudian mengambil kesimpulan yang berlaku pada objek serta disajikan dalam bentuk penelitian didasarkan tata cara ilmiah.

## H. Jadwal Kegiatan Penelitian

**Tabel 111.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Serumpun Jaya, Kec. Pasir Penyu, Kab. Indragiri Hulu adalah sebagai berikut**

No	Jenis kegiatan	Bulan dan Minggu ke 2020-2021																							
		Oktober-april				April –mei				Juni-juli				Juli-Agustus				September-oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																				
2	Seminar UP					■																			
3	Revisi UP						■																		
4	Revisi Kuesioner								■																
5	Rekomendasi Survey									■	■	■	■												
6	Survey Lapangan												■												
7	Analisis Data													■	■	■	■								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																■	■	■	■	■				
9	Konsultasi Revisi Skripsi																				■				
10	Ujian Konfrehensif																					■			
11	Revisi Skripsi																						■	■	
12	Penggandaan																								■

Sumber:Modifikasi Penulis 2021

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu

Sejarah kabupaten Indragiri hulu telah dimulai sejak kerajaan Indragiri, hingga berlanjut sebelum zaman penjajahan Belanda, sebelum kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada tahun 1996 terjadi penambahan kecamatan dengan adanya pemekaran Kecamatan Kuantan Tengah, Pasir Peny, Rengat dan Kecamatan yang baru adalah :

- a. Kecamatan Benai ibukota Benai
- b. Kecamatan Kelayang ibukota Simpang Kelayang
- c. Kecamatan Rengat Barat ibukota Pematang Reba

Pada tahun 1996 Kabupaten Indragiri Hulu dipecah lagi menjadi 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Kuansing yang berkedudukan di Taluk Kuantan dan Kabupaten Indragiri Hulu yang berkedudukan di Rengat. Pada tahun 2004 mengalami beberapa pemekaran wilayah kecamatan sehingga menjadi 14 kecamatan, yaitu sebagai berikut :

- a. Kecamatan Rengat Ibukota Rengat
- b. Kecamatan Rengat Barat Ibukota Pematang Reba
- c. Kecamatan Seberida Ibukota Pangkalan Kasai
- d. Kecamatan Batang Gansal Ibukota Seberida
- e. Kecamatan Batang Cenaku Ibukota Aur Cina
- f. Kecamatan Pasir Peny Ibukota Air Molek
- g. Kecamatan Lirik Ibukota Lirik
- h. Kecamatan Kelayang Ibukota Simpang Kelayang
- i. Kecamatan Peranap Ibukota Peranap
- j. Kecamatan Batang Peranap Ibukota Pematang
- k. Kecamatan Rakit Kulim Ibukota Petonggan
- l. Kecamatan Sungai Lala Ibukota Kelawat
- m. Kecamatan Lubuk Batu Jaya Ibukota Lubuk Batu Tunggal

n. Kecamatan Kuala Cenaku Ibukota Kuala Cenaku

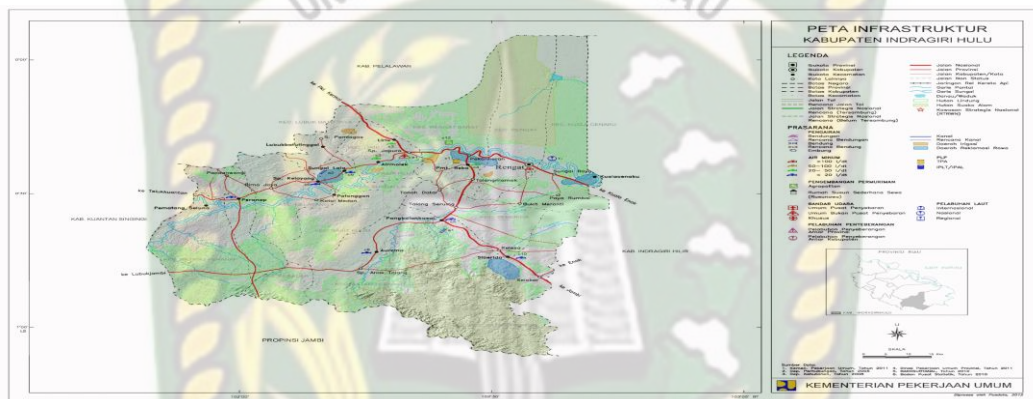


Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## 1. Letak geografis kabupaten Indragiri hulu

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu meliputi 8.198.26 km (819.826.0 Ha) yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi dan rawa-rawa dengan ketinggian 50-100m diatas permukaan laut. Kabupaten Indragiri hulu terletak di :  $0^{\circ}15'$ Lintang Utara,  $1^{\circ}5'$  Lintang Selatan,  $101^{\circ}10'$  Bujur Timur,  $102^{\circ}48'$  Bujur Barat. Adapun Batas Wilayah Indragiri Hulu, yaitu :



## 2. Potensi daerah kabupaten Indragiri hulu

- a. Agribisnis : sawit dan karet
- b. Industry
- c. Pertambangan : batubara, emas, pasir, kerikil dan minyak bumi

Komoditas perkebunan yang berkembang di Indragiri Hulu tidak hanya karet. kelapa sawit, kakao, pinang juga sudah dikembangkan. Akan tetapi, diantara produk perkebunan tersebut, yang dominan di wilayah ini, karet dan kelapa sawit. Lahan perkebunan karet dan sawit tersebut menyebar di seluruh wilayah Indragiri Hulu. Hampir di semua kecamatan dapat dijumpai lahan perkebunan. Total luas lahan perkebunan karet sebesar 77.582 hektar (tahun 2000) dan banyak dijumpai di Kecamatan Kelayang, Siberida dan Peranap. Total luas perkebunan kelapa sawit sebesar 99.792 hektar (tahun 2000). Sebagian besar terletak di Kecamatan Pasir Penyau, Siberida dan Peranap. Tidak mengherankan bila sampai 1999,

perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu ini bersandar pada pertanian terutama sektor perkebunan yang nilainya mencapai Rp 124 miliar.

### 3. Visi kabupaten Indragiri hulu

“ mewujudkan Indragiri Hulu lebih sejahtera 2021”

### 4. Misi kabupaten Indragiri Hulu

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pengawasan dalam tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
4. Meningkatkan pemerataan ketersediaan infrastruktur fasilitas umum dan fasilitas social.
5. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan social serta memperkuat daya saing daerah.
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
7. Meningkatkan keharmonisan bermasyarakat tanpa membedakan suku, agama dan potensi.

## **B. Profil Singkat Desa Serumpun Jaya**

### **1. Sejarah Desa**

Desa Serumpun Jaya Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu Yang awalnya Dusun II Batang Deras Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu.

Dan disekitar Tahun Dua Ribu Bersepakatlh Seluruh Masyarakat Dusun II Batang Deras Untuk mengusulkan Menjadi Desa Sendiri berpisah dengan Desa Jatirejo yang di Kordinir oleh Saudara Yuharli. Setelah mendapatkan kesepakatan seluruh Masyarakat Saudara Yuharli Membuat Permohonan Yang diajukan kepada Dinas Bapemades Kabupaten Indragiri Hulu dan setelah beberapa tahun



kemudian di akhir tahun 2004 Dusun II Batang Deras Mekar menjadi Desa Serumpun Jaya. Dan di pimpin Oleh PJS yaitu Tokoh Masyarakat Desa Serumpun Jaya Dari Hasil Musyawarah Seluruh Masyarakat Desa Serumpun Jaya Terpilih lah Saudara Afrizal Sebagai pjs Selama lebih kurang satu tahun Setengah.

Dan setelah dipimpin oleh saudara Afrizal Selama setahun setengah maka diselenggarakan Pemilihan Kepala Desa ditahun 2006 maka terpilihlah Salah satu Tokoh Masyarakat Desa Serumpun Jaya yaitu Saudara Nasip.

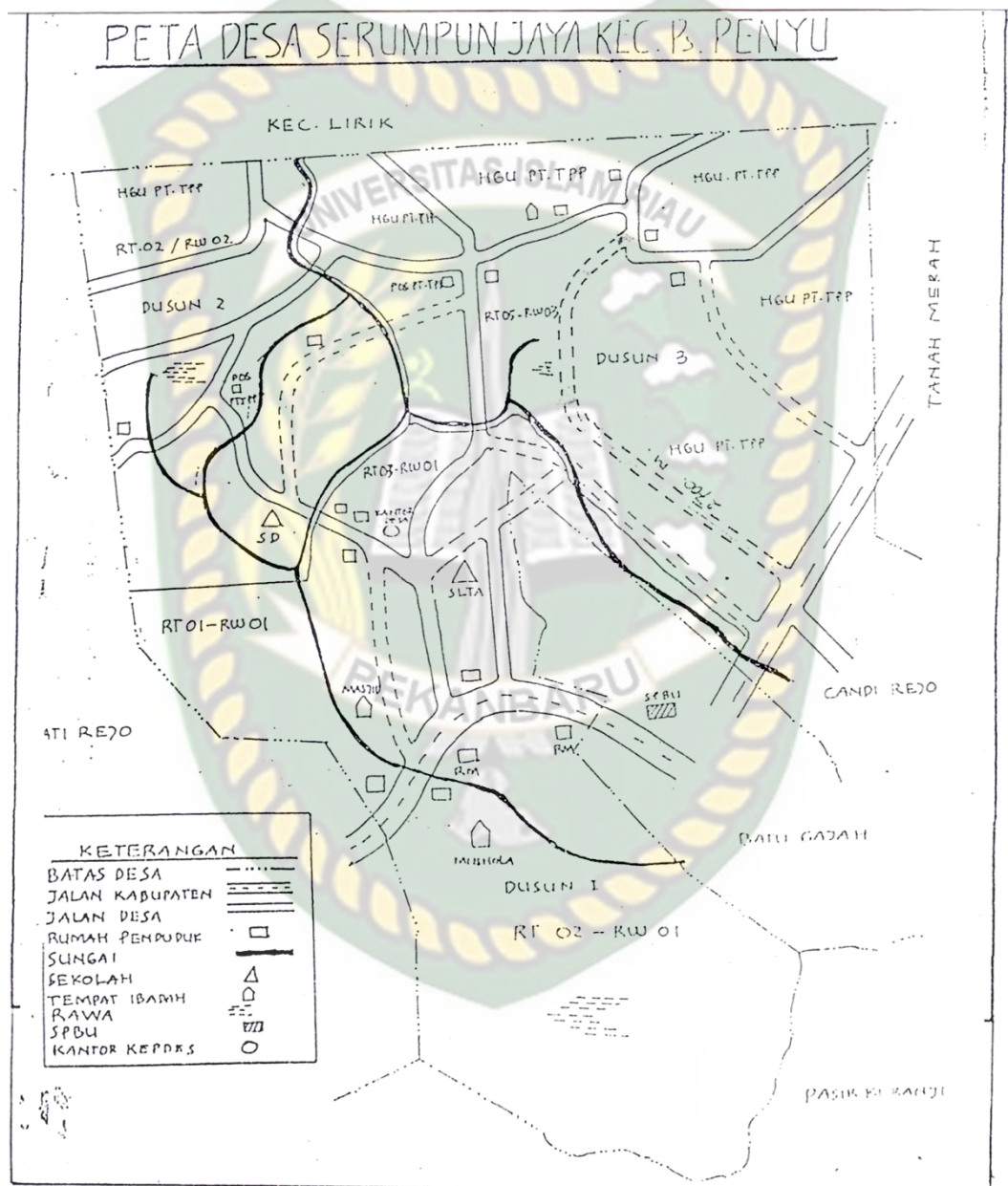
Dan Desa Serumpun Jaya dengan Luas wilayah lebih kurang 2000 H Dngan Berbatas sebelah Barat dengan Desa Jatirejo Kecamatan Pasir Penyus Sebelah Timur Berbatas Dengan Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyus Sebelah Utara bebatas Dengan Desa Sungai Sagu Kecamatan Lirik Dan Sebelah Selatan Berbatas dengan Desa Pasir Keranji Kecamatan Pasir Penyus. Desa Serumpun Jaya terdiri Dari bermacam macam Suku dan terdiri dari tiga dusun yaitu dusun Satu berwilayah kerja di dusun satu Batang Deras terdiri dari satu RW dan tiga RT Yaitu RT I RT II Dan RT III .Dusun II berwilayah Kerja di Teratak Batang Dan dan terdiri dari satu RW dan satu RT .Dusun III berwilayah Kerja Di bangun Rejo Tanah Jugruk terdiri dari satu RW Dan satu RT.

Demikianlah Sejarah desa ini yang dapat kami sampaikan untuk dapat menjadi kenang kenangan bagi seluru masyarakat dan Anak Cucu Desa Serumpun Jaya.

## **2. Demografi**

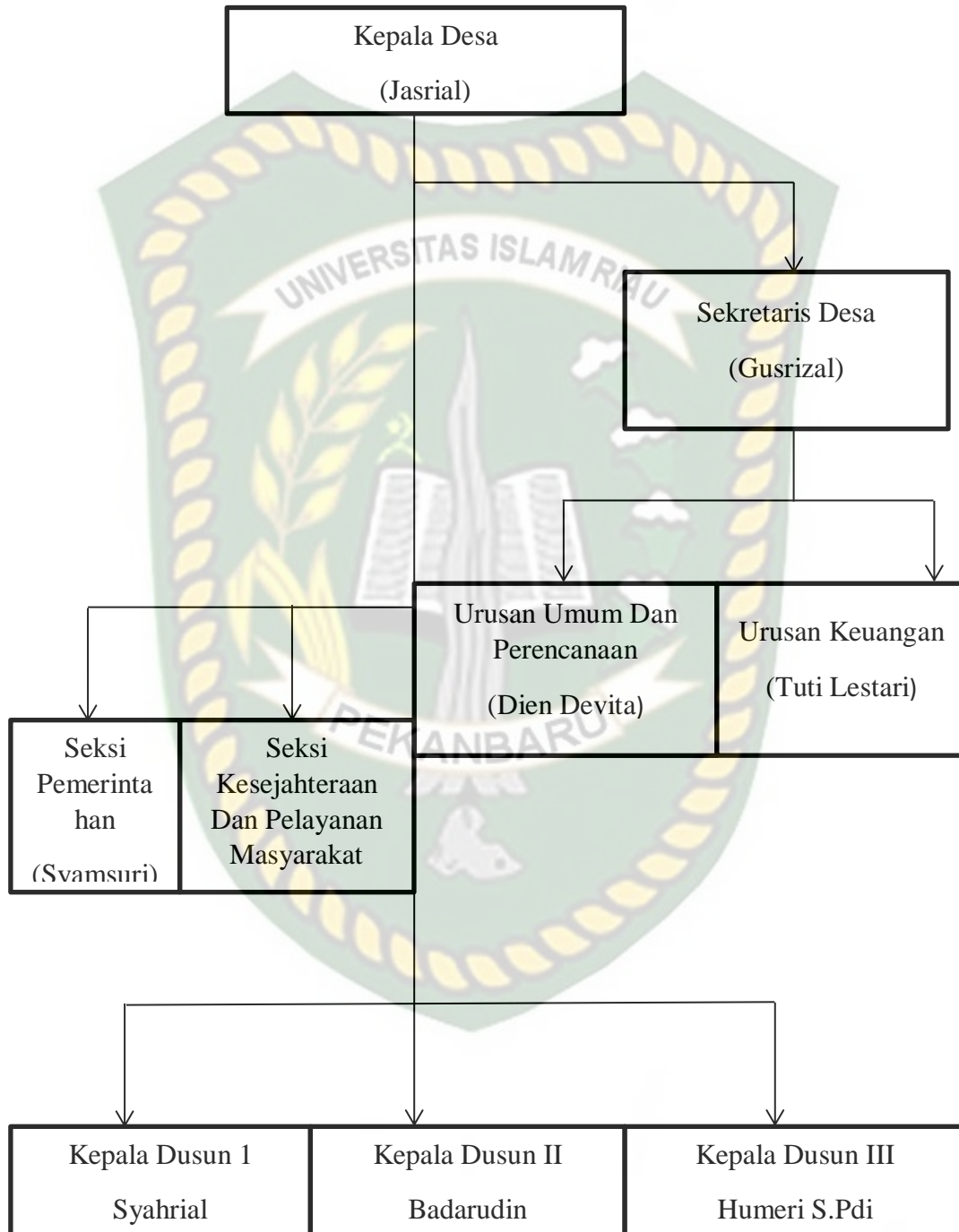
Demografi Desa Serumpun Jaya terletak di wilayah Kecamatan Pasir Penyus gambKabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dengan luas wilayah + 2.000 Ha,

ketinggian dari permukaan laut (DPL) 18 M, suhu udara rata-rata 19,5<sup>o</sup>cc sampai dengan 34,2<sup>o</sup>cc , jarak dari kabupaten 50 KM, jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 8 KM, jarak dari ibukota provinsi 180 KM.



Sumber : hasil penelitian lapangan tahun 2021

**Gambar IV. 1 : Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu**



*Sumber : hasil penelitian lapangan tahun 2021*

### 3) Maksud Dan Tujuan Desa Serumpun Jaya

#### a) Maksud :

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa Serumpun Jaya ini mempunyai maksud sebagai berikut :

- 1) Menjabarkan visi, misi dan program pemerintah desa dalam kurun waktu 6 tahun dalam melaksanakan proses pembangunan
- 2) Sebagai wujud realisasi dari implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa berikut dengan aturan turunannya berupa peraturan pemerintah dan peraturan menteri serta peraturan daerah, dimana pemerintah desa memiliki hak dan kewajiban membangun desa yang pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa, baik dibidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.
- 3) Memberikan ruang dan waktu masyarakat desa untuk berpartisipasi dengan sesungguhnya dalam proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan serta pelestarian kegiatan.

#### b) Tujuan

- 1) Memberikan arah dan panduan pembangunan desa serumpun jaya
- 2) Adanya suatu dokumen perencanaan pembangunan desa menjadi arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa dan sasaran strategis untuk masa enam tahun

- 3) Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh Anggaran dan pendapatan Belanja Desa (APBDes), APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.
- 4) Sebagai bahan evaluasi dan refleksi pembangunan.
- 5) Sebagai media informasi
- 6) Untuk mengukur kinerja pemerintahan desa terhadap rencana pembangunan dan realisasi serta pencapaian pemabangunan desa.

#### **4) Visi Dan Misi Desa Serumpun Jaya**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Serumpun Jaya ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Desa Serumpun Jaya seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan.

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Serumpun Jaya.

a. **Visi Desa**

Terwujudnya masyarakat Desa Serumpun Jaya yang Religius, sejahtera, mandiri (resmi pada tahun 2001).

b. **Misi Desa**

Untuk mencapai tujuan dari Visi di atas maka disusunlah Misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut di atas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang partisipatif, akuntabel, transparan, dinamis dan kreatif.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan keagamaan
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kependudukan dan kete nagakerjaan.
4. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan masyarakat melalui pengelolaan pertanian intensifikasi yang maju, unggul dan ramah lingkungan menuju Desa Agrobisnis.
5. Meningkatkan infrastruktur desa melalui peningkatan prasarana jalan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.
6. Menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan perekonomian perdesaan.
7. Menyusun regulasi desa dan menata dokumen-dokumen yang menjadi kewajiban desa sebagai payung hukum pembangunan desa.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Sebelum membahas mengenai implementasi program keluarga harapan (PKH) di Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu maka terlebih dahulu penulis menguraikan beberapa identitas responden.

Identitas responden ini diperlukan guna membereikan gambaran tentang menjawab tujuan penelitian yang dimaksud. Dalam pelaksanaanya penyebaran kuisisioner dan wawancara yang sudah siap disajikan kepada responden. Maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda dan disajikan sebagai sampel.

#### 1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu usaha guna mengetahui kepribadian atau kemampuan seseorang, cenderung akan mempengaruhi pola pikir serta tingkah laku dari setiap orang. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan berbagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini bahwa dengan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tingkat analisa dalam menilai implementasi program keluarga harapan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan di Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu. Maka dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden di desa serumpun jaya sebagai berikut:

**Tabel V.I: Tingkat Pendidikan Responden Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	Tidak melanjutkan pendidikan	12	30%
2	SD/Sederajat	15	38%
3	SLTP/Sederajat	7	17%
4	SLTA/Sederajat	4	10%
5	S1	2	5%
<b>Jumlah</b>		40	100%

*Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2021*

Dari tabel V.I tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden penelitian di desa serumpun jaya untuk anggota penerima bantuan program keluarga harapan terdiri dari 40 responden, yaitu responden yang tidak memiliki pendidikan terdiri dari 12 orang atau 33%, kemudian yang berpendidikan SD/Sederajat sebanyak 14 orang atau 39%, selanjutnya yang berpendidikan SLTP/Sederajat sebanyak 6 orang atau 17%, dan yang terkahir yang memiliki tingkat pendidikan SLTA/Sederajat terdiri dari 4 orang atau sekitar 11%. Sehingga berdasarkan klasifikasi tabel pendidikan diatas jumlah terbanyak yaitu didominasi pada tingkat SD/Sederajat yaitu berjumlah 15 orang dari total jumlah seluruhnya yaitu 40 orang.

## 2. Tingkat usia

Usia dapat menjadi ukuran kematangan atau kedewasaan seseorang dalam berfikir dan bertindak sehingga mempengaruhi untuk penentuan kemampuan dan pola pikir serta produktivitas kerja. Dalam hal ini pula dapat dilihat pada tingkat analisis yang akan mempengaruhi responden dalam pengisian kuisioner. Berikut dijelaskan identitas responden penelitian di desa serumpun jaya berdasarkan tingkat umur dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Tabel V.II: Tingkat Usia Pada Responden Penelitian Dari Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Di Desa Serumpun Jaya**

No	Tingkat Usia	Jumlah	Presentase
1	21-30	1	2%
2	31-40	7	18%
3	41-50	21	53%
4	>50	11	27%
<b>Jumlah</b>		40	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2021

Dari tabel V.2 diatas, maka dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden penelitian penerima bantuan program keluarga harapan di Desa Serumpun Jaya terdiri dari 40 responden, yaitu responden berumur 21-30 yaitu 1 orang dengan presentase 2%, untuk responden yang berumur 31-40 tahun yaitu sebanyak 7 orang atau sekitar 18%, untuk responden yang berumur 41-50 tahun yaitu sekitar 21 orang atau 53%, untuk responden yang berusia lebih dari 50 tahun yaitu sebanyak 11 orang atau 27%.

### 3. Jenis Kelamin

Jenis kelamin merupakan elemen genetika dari responden. Jenis kelamin terbagi dua, yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Kemudian dalam penelitian ini identitas responden berdasarkan jenis kelamin yang dimaksud agar dapat mengetahui manfaat dalam setiap program yang dimaksud agar dapat mengetahui manfaat dalam setiap program dan sikap dalam menjawab kuisisioner yang sudah disebarakan.

**Tabel V.3: Jenis Kelamin Pada Responden Penelitian Dari Unsur Anggota Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Di Desa Serumpun Jaya Kabupaten Indragiri Hulu**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-Laki	5	12%
2	Perempuan	35	88%
<b>Jumlah</b>		40	100%

*Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2021*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dimana masyarakat yang menjadi responden yang berjenis kelamin laki-laki 5 orang dengan presentase 12% dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 35 orang dengan presentase sebesar 88%. Berdasarkan klasifikasi jenis kelamin diketahui bahwa pada waktu penelitian jumlah responden penelitian terbanyak adalah responden perempuan. Fakta ini berdasarkan keadaan dilapangan bahwa responden perempuan lebih banyak mendapatkan bantuan program tersebut daripada laki-laki.

#### **4. Pekerjaan**

Sebagai data pelengkap penelitian, maka dapat dilihat mata pencarian dari responden penelitian di desa serumpun jaya kecamatan pasir penyu sebagai aktivitas pekerjaan yang pokok penghidupan dalam memberdayakan potensi sumber daya alam. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis mata pencarian responden penelitian, dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel V.4: Mata Pencarian Responden Penelitian Dari Masyarakat Penerima Program Keluarga Harapan Di Desa Serumpun Jaya Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu**

No	Mata Pencarian	Jumlah	Presentase
1	Ibu Rumah Tangga	6	15%
2	Pedagang	4	10%
3	Petani	27	68%
4	PNS	2	5%
5	Wirausaha	1	2%
<b>Jumlah</b>		40	100%

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mata pencarian dari masyarakat di desa serumpun jaya didominasi oleh masyarakat yang bekerja sebagai petani yaitu berjumlah 27 orang dengan presentase sebanyak 68%, kemudian masyarakat yang bekerja sebagai ibu rumah tangga sebanyak 6 orang dengan jumlah presentase 15% dan yang selanjutnya yaitu masyarakat yang bekerja sebagai pedagang sebanyak 4 dengan presentase 10% kemudian yang bekerja sebagai PNS yaitu ada 2 orang dengan presentasi yaitu 5% dan yang terakhir yaitu wirausaha ada satu orang dengan presentase 2%.

#### **B. Hasil Penelitian Tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu)**

Untuk mengetahui implementasi program keluarga harapan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu, maka dapat dilihat dari empat indikator menurut Edward III yang dapat menentukan keberhasilan implementasi program diantaranya sebagai berikut:

## 1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan kepada orang lain. Implementasi program akan lebih efektif apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

Penetapan sasaran dilakukan dalam rangka perluasan jangkauan penerima manfaat PKH. Sumber data penetapan sasaran berasal dari BDT Penanganan Fakir Miskin sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Penetapan sasaran PKH mengikuti langkahlangkah sebagai berikut:

- 1) Penyiapan Data dan Penetapan Sasaran Direktorat Jaminan Sosial Keluarga melakukan penelusuran data KKS per kecamatan untuk dijadikan penetapan kuota calon penerima PKH yang akan divalidasi.
- 2) Penetapan Data Awal Validasi Direktorat Jaminan Sosial Keluarga mengirimkan data calon penerima PKH kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial kabupaten/kota yang kemudian memilih nama yang sudah dan belum menjadi peserta PKH. Pemda dapat mengusulkan nama yang kemudian akan dipadankan dengan data BDT oleh Kemensos berdasarkan kuota. Hasil pemilihan data oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota dikirimkan kembali ke Direktorat Jaminan Sosial Keluarga sebagai data awal validasi PKH sesuai kuota yang telah ditetapkan oleh Kemensos disertai Berita Acara Penetapan yang disahkan oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

- 3) Pertemuan Awal dan Validasi Direktorat Jaminan Sosial Keluarga mengirimkan data calon peserta PKH ke Pelaksana PKH Kabupaten/Kota untuk keperluan validasi. Setelah menerima data tersebut, Pelaksana PKH Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan pendamping dan operator untuk menetapkan pembagian jumlah calon peserta dan operator untuk menetapkan pembagian jumlah calon peserta PKH berdasarkan wilayah kerja pendamping. Kemudian Pelaksana PKH Kabupaten/Kota mencetak formulir validasi dan surat undangan pertemuan awal ke calon peserta PKH untuk menghadiri pertemuan awal.
- 4) Penetapan Peserta Setelah pertemuan awal dan validasi, pendamping memasukkan data menggunakan aplikasi SIM PKH Hybrid (Sistem Informasi Manajemen PKH dalam bentuk aplikasi yang didesain untuk mengelola data peserta PKH). Data dari SIM ini dapat diunduh dan diserahkan ke Operator Dinas Sosial kabupaten/kota dan diunggah ke SIM PKH Nasional. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga mengolah data hasil validasi ini dan menentukan Daftar Tetap Peserta PKH untuk mendapatkan bantuan PKH. Peserta PKH ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos.
- 5) Penyiapan Data dan Penetapan Sasaran Direktorat Jaminan Sosial Keluarga melakukan penelusuran data KKS per kecamatan untuk dijadikan penetapan kuota calon penerima PKH yang akan divalidasi.
- 6) Penetapan Data Awal Validasi Direktorat Jaminan Sosial Keluarga mengirimkan data calon penerima PKH kepada pemerintah daerah, khususnya

Dinas Sosial kabupaten/kota yang kemudian memilih nama yang sudah dan belum menjadi peserta PKH. Pemda dapat mengusulkan nama yang kemudian akan dipadankan dengan data BDT berdasarkan kuota. Hasil pemilihan data oleh Dinas Sosial kabupaten/kota dikirimkan kembali ke Direktorat Jaminan Sosial Keluarga sebagai data awal validasi PKH sesuai kuota yang telah ditetapkan oleh Kemensos disertai Berita Acara Penetapan yang disahkan oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial kabupaten/kota.

- 7) Pertemuan Awal dan Validasi Direktorat Jaminan Sosial Keluarga mengirimkan data calon peserta PKH ke Pelaksana PKH kabupaten/kota untuk keperluan validasi. Setelah menerima data tersebut, Pelaksana PKH kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan pendamping dan operator untuk menetapkan pembagian jumlah calon peserta dan operator untuk menetapkan pembagian jumlah calon peserta PKH berdasarkan wilayah kerja pendamping. Kemudian Pelaksana PKH kabupaten/kota mencetak formulir validasi dan surat undangan pertemuan awal ke calon peserta PKH untuk menghadiri pertemuan awal.
- 8) Penetapan Peserta Setelah pertemuan awal dan validasi, pendamping memasukkan data menggunakan aplikasi SIM PKH Hybrid. Data ini dapat diunduh dan diserahkan ke Operator Dinas Sosial kabupaten/kota dan diunggah ke SIM PKH Nasional. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga mengolah data hasil validasi ini dan menentukan Daftar Tetap Peserta PKH untuk mendapatkan bantuan PKH. Peserta PKH ditetapkan dengan Surat

Keputusan (SK) Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI. Setiap penerima manfaat PKH ditandai dengan kartu PKH.

Untuk mengetahui pelaksanaan komunikasi dalam implementasi program keluarga harapan dalam upaya mensejahteraan masyarakat di Desa Serumpun Jaya Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat jawaban responden penelitian dilihat dari unsur indikator komunikasi yang dilaksanakan dua item penilaian yaitu: sosialisasi mengenai persyaratan penerima PKH dan sosialisasi tentang peraturan penerimaan PKH, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada data tabel berikut ini:

**Tabel V.5: Tanggapan Responden Penelitian Masyarakat Anggota Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu**

No	Item Penilaian	Skala Pengukuran			Jumlah
		Pernah	Sering	Tidak pernah	
1	2	3	4	5	6
1	Sosialisasi Persyaratan Penerima PKH	22 (61%)	-	14 (39%)	36 (100%)
2	Sosialisasi Peraturan Penerimaan PKH	26 (72%)	-	10 (28%)	36 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>48</b>		<b>24</b>	<b>72</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>24</b>		<b>12</b>	<b>36</b>
<b>Presentase</b>		<b>67%</b>		<b>33%</b>	<b>100%</b>
<b>Skala Pengukuran</b>		<b>67-100%</b>			
<b>Kriteria</b>		<b>Terimplementasi</b>			

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada indikator komunikasi didominasi oleh jawaban responden pernah sebanyak 24 orang responden dengan presentase 67%

kemudian disusul oleh jawaban tidak pernah sebanyak 12 dengan presentase yaitu 33% sedangkan responden yang menjawab sering tidak ada atau 0%.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator komunikasi pada pelaksanaan program keluarga di desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu berkategori pernah dengan jumlah responden sebanyak 24 orang responden dengan presentase sebesar 67% masuk dalam kriteria “Terimplementasi”.

Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut ditarik kesimpulan bahwa asanya implementasi program keluarga harapan(PKH) di Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu dilihat dari unsur komunikasi berada pada presentase 67% pada kategori “Terimplementasi” dengan alasan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan kabupaten telah dilakukan dengan baik seperti yang ditujukan kepada masyarakat penerima manfaat dan informasi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Misbachul Ulum, St sebagai koordinator Kabupaten PKH pada tanggal 28 pukul 10.14 WIB mengenai indikator komunikasi, beliau mengatakan bahwa:

*“Ya, kami pernah melakukan sosialisasi di desa yang mendapatkan atau melaksanakan program keluarga harapan dengan menjelaskan apa saja syarat dan peraturan yang diakan dipenuhi oleh masyarakat penerima manfaat, sebelum itu pemerintah kabupaten menerima data calon peserta penerima PKH diturunkan dari kementerian sosial sebagai perpanjangan Dinas Sosial menyiapkan undangan pertemuan awal untuk melakukan validasi data kelayakan calon peserta dan sosialisasi program bantuan sosial PKH”.*



Selanjutnya wawancara dengan bapak Gusti Kancil S.E,Sy selaku pendamping PKH pada tanggal 27 September 2021 pukul 10.23 WIB didesa Serumpun Jaya yang mengatakan bahwa:

*“ya, sosialisasi pernah kami lakukan dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat dan memberi tahu masyarakat mengenai persyaratan dan persiapan yang akan dilakukan oleh masyarakat penerima manfaat bantuan sosial program keluarga harapan ini dan pertemuan juga dilakukan setiap tiga bulan atau paling lama enam bulan sekali dengan mengadakan diskusi tentang kendala, jika ada kendala yang dihadapi semua dibahas agar bulan selanjutnya kesalahan atau bahkan kendala yang terjadi bisa diperbaiki”.*

Kemudian wawancara dengan bapak jasrial selaku kepala desa di desa serumpun jaya pada pada tanggal 27 September pukul 09.30 WIB, beliau mengatakan bahwa:

*“iya, wawancara pernah dilaksanakan dikantor desa dan juga di gedung serbaguna di desa serumpun jaya, wawancara dengan tujuan memberitahu dan menjelaskan kepada masyarakat penerima bantuan program keluarga harapan mengenai syarat bahkan peraturan yang harus dipenuhi oleh masyarakat penerima bantuan dari program ini.”*

Dan yang terakhir wawancara yang dilakukan dengan bapak Agus Dwi Santoso selaku Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Masyarakat di Desa Serumpun Jaya pada tanggal 27 September 2021 pukul 11.05 wib, beliau mengatakan bahwa:

*“ada, pertemuannya diadakan satu bulan sekali atau tiga bulan sekali dengan memberikan undangan kepada masyarakat Desa Serumpun Jaya yang mendapatkan atau menerima bantuan sosial program keluarga harapan atau PKH. Pertemuan diadakan dalam bentuk diskusi mengenai apa saja keluhan masyarakat terkait dengan program keluarga harapan ini sehingga dapat diperbaiki”.*

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis saat penelitian terlihat dari pelaksanaan indikator komunikasi sudah dijalankan atau dilaksanakan mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa

yang mengurus bagian bantuan sosial maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi tersebut terimplementasi dan terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan walaupun terkadang dalam menagadakan sosialisasi ada beberapa masyarakat yang tidak dapat hadir pada waktu pertemuan pemerintah dan masyarakat penerima manfaat program keluarga harapan.

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis di lapangan maka dapat disimpulkan mengenai sub indikator tentang sosialisasi persyaratan bagi penerima bantuan program keluarga harapan pada indikator komunikasi bahwa sosialisasi pernah atau ada dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa mengenai persyaratan yang akan dipenuhi oleh masyarakat yang menerima bantuan dari program keluarga harapan ini. Pertemuan atau diskusi pun sering dilakukan, yaitu tiga bulan sekali bahkan ada juga yang satu bulan sekali dan yang paling lama enam bulan sekali. Diskusi ini dilakukan untuk mengetahui apa saja hambatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan dari program ini. Sehingga kesalahan, hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dapat diatasi dan diperbaiki. Walaupun masih terdapat hambatan mengenai masyarakat yaitu ketika melakukan sosialisasi dan pertemuan masih terdapat beberapa masyarakat penerima manfaat yang tidak hadir. Namun informasi tetap dapat diterima oleh masyarakat yang tidak hadir dengan cara meminta informasi kepada masyarakat yang hadir sehingga informasi tetap diterima oleh masyarakat tersebut. Dengan adanya arus informasi sangat diperlukan dalam basis tindakan, dengan demikian seseorang yang memiliki arus informasi yang lebih luas maka akan dengan mudah memperoleh informasi, seperti contoh seseorang yang dapat bersosialisasi dengan

baik makan akan memiliki tingkat partisipasi anggota yang lebih baik dan memiliki rentang jaringan yang lebih luas. Sehingga seseorang dapat dengan mudah mendapatkan banyak informasi jika seseorang itu mempunyai jaringan yang banyak untuk memperoleh sumber informasi yang kuat yang didapat dari jaringan tersebut.

Proses komunikasi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tersebut tentunya menjadi tanggungjawab pendamping dalam melaksanakan tugasnya. Komunikasi juga menjadi dasar dalam pelaksanaan program keluarga harapan karena dengan adanya komunikasi hubungan antara pendamping dengan masyarakat menjadi baik. Pendamping juga melakukan temu kunjung bulanan dengan petugas kesehatan dan pendidikan di lokasi pelayanan. Kegiatan temu kunjung dilaksanakan minimal sebulan sekali dan bertempat di unit pelayanan (sekolah/puskesmas yang dipilih secara berdasar kemudahan akses) oleh pendamping dan penyedia layanan terkait (pendidikan atau kesehatan) diwilayah kelurahan masing-masing.

Lingkup kegiatan meliputi diskusi dan berbagi pengetahuan untuk mengetahui perkembangan pelayanan dan program keluarga harapan, sebagai sarana untuk memberikan motivasi kepada peserta program keluarga harapan dalam menjalankan komitmen. Pemberian motivasi dilakukan kepada peserta program keluarga harapan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Motivasi lebih ditekankan kepada peserta program keluarga harapan yang rentan untuk mengabaikan komitmen agar tidak terkena sanksi.

Pendamping akan turun langsung kemasyarakat dan melakukan kerjasama antara peserta program keluarga harapan. Pendamping juga menerima dan menggali keluhan yang menjadi permasalahan yang dihadapi peserta program keluarga harapan, kemudian pendamping harus melaporkan seluruh kegiatan dan permasalahannya kesekretariat UPPKH Kabupaten/Kota (Dinas Sosial) dan Koordinator Wilayah. Jadi pendamping sangat dibutuhkan dalam melakukan tindak lanjut dalam waktu cepat dan juga mempermudah UPPKH Kabupaten/Kota dalam mendeteksi segala macam permasalahan yang ada. Dengan adanya kerjasama antara pihak UPPKH Kabupaten/kota, pendampingan dan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam mensukseskan program keluarga harapan.

Proses komunikasi dalam pelaksanaan program keluarga harapan sudah sangat baik, dengan adanya tanggung jawab, memberikan motivasi dan menggugah kesadaran peserta program keluarga harapan tentang pentingnya menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan disekitar tempat tinggalnya. Pendamping juga rutin dalam melakukan pertemuan dengan peserta program keluarga harapana. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pertemuan tersebut adalah:

- a. Menyelenggarakan pertemuan awal dengan seluruh peserta program keluarga harapan.
- b. Menginformasikan atau bersosialisasi kepada RTSM peserta program keluarga harapan dan mendukung sosialisasi kepada masyarakat umum.
- c. Mengelompokkan peserta kedalam 5 kelompok peserta program keluarga harapan untuk mempermudah tugas pendampingan.

Berdasarkan hasil kuisioner, wawancara, observasi dan dokumentasi penulis menyimpulkan bahwasanya implementasi program keluarga harapan (PKH) dalam upaya mensejahterakan masyarakat (studi desa serumpun jaya, kecamatan pasir penyu, kabupaten indragiri hulu) dilihat dari indikator komunikasi dengan dua item penilaian yaitu sosialisasi mengenai peraturan dan sosialisasi mengenai pesyaratan program keluarga harapan berada pada kategori “terimplementasi”.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya adalah salah satu unsur atau bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan menurut Edward III, Dalam implementasi kebijakan beberapa indikator yang mengukur sumber daya diantaranya: staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

a. Sumber daya manusia terdiri atas:

- 1) penasihat nasional;
- 2) tenaga bantuan teknis.
- 3) tenaga ahli;
- 4) koordinator regional;
- 5) koordinator wilayah;
- 6) koordinator daerah kabupaten/kota;
- 7) supervisor pekerjaan sosial;
- 8) pendamping sosial;
- 9) asisten pendamping sosial; dan
- 10) administrator pangkalan data.

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud yaitu direkrut, diseleksi, dan ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH. Penggunaan sumber

daya manusia sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara.

Berikut jawaban responden penelitian dari anggota masyarakat penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan Di Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel V. 6: Tanggapan Responden Penelitian Masyarakat Anggota Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu**

No	Item Penilaian	Skala Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang baik	
1	2	3	4	5	6
1	Sumber daya pendukung	17 (47%)	16 (45%)	3 (8%)	100%
2	Fasilitas	14 (39%)	17 (47%)	5 (14%)	100%
<b>Jumlah</b>		<b>31</b>	<b>33</b>	<b>8</b>	<b>72</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>15</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>36</b>
<b>Presentase</b>		<b>42%</b>	<b>47%</b>	<b>11%</b>	<b>100%</b>
<b>Skala Pengukuran</b>		<b>34-66%</b>			
<b>Kriteria</b>		<b>Cukup Terimplementasi</b>			

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa hasil penyebaran kuisioner dengan responden sebanyak 36 orang tersebut, ada responden yang menjawab baik sebanyak 15 orang dengan presentase sebesar 42% selanjutnya responden yang menjawab cukup baik sebanyak 17 dengan presentase sebesar 47% kemudian yang menjawab kurang baik yaitu sebanyak 4 orang dengan presentase 11% .

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Misbachul Ulum, St sebagai koordinator Kabupaten PKH pada tanggal 28 pukul 10.14 WIB mengenai indikator komunikasi, beliau mengatakan bahwa:

*“untuk sumber daya manusia belum terlalu mencukupi karna masih membutuhkan penambahan, untuk itu tahun ini kami mengajukan penambahan sumber daya manusia yaitu sebagai pendamping program keluarga untuk beberapa kecamatan. Kalo untuk fasilitas semuanya sudah baik dan memadai seperti fasilitas layanan dibidang kesehatan (faskes) dan bidang pendidikan (fasdik) yang tersedia disekitar mereka. Karna dengan adanya bantuan sosial berupa program keluarga harapan ini masyarakat penerima manfaat tentu saja memiliki akses dan pemanfaatan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, pendampingan termasuk akses terhadap program perlindungan lainnya”.*

Selanjutnya wawancara dengan bapak Gusti Kancil S.E,Sy selaku pendamping PKH pada tanggal 27 September 2021 pukul 10.23 WIB didesa Serumpun Jaya yang mengatakan bahwa:

*“untuk sumber daya yang disediakan sudah lengkap, saya selaku pendamping Program bantuan sosial di kecamatan terutama di desa Serumpun Jaya ini mengatakan bahwa untuk sumber daya manusia sudah lengkap dan dapat bekerja sesuai dengan tanggung jawab yang sudah diberikan. Untuk fasilitas yang disediakan juga sudah terpenuhi karna masyarakat penerima manfaat (KPM) terutama masyarakat yang mendapatkan bantuan program keluarga harapan ini di berikan kartu ATM masing-masing dimana ATM ini digunakan untuk mengambil bantuan berupa uang yang diberikan”.*

Kemudian wawancara dengan bapak jasrial selaku kepala desa di desa serumpun jaya pada tanggal 27 September pukul 09.30 WIB, beliau mengatakan bahwa:

*“untuk sumberdaya insha Allah sudah dapat dikatakan mencukupi, terutama sumberdaya manusia sudah melakukan pekerjaannya sesuai tanggung jawab yang diberikan masing-masing, seperti yang saya lihat begitu dan semuanya berjalan dengan baik walaupun terkadang ada beberapa masalah kecil tetapi hal tersebut dapat teratasi dengan baik dan untuk fasilitas yang diberikan juga lengkap yang mana keluarga penerima manfaat ini mempunyai kartu PKH dan kartu ATM masing-masing”.*

Dan yang terakhir wawancara yang dilakukan dengan bapak Agus Dwi Santoso selaku Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Masyarakat di Desa Serumpun Jaya pada tanggal 27 September 2021 pukul 11.05 wib, beliau mengatakan bahwa:

*“untuk semua sumberdaya sudah terpenuhi dan memenuhi, baik itu sumberdaya manusia atau orang yang yang diberikan tanggung jawab dalam melaksanakan program keluarga harapan ini semua nya sudah berkerja sesuai dengan tanggung jawab dan tugasnya masing-masing”.*

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis saat penelitian terlihat dari pelaksanaan indikator sumber daya dan fasilitas sarana dan prasarana sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa yang mengurus bagian bantuan sosial maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi tersebut terimplementasi dan terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh penulis dilapangan maka penulis dapat melihat bahwa pelaksanaan indikator sumber daya yang terdiri dari sub indikator sumber daya manusia dan fasilitas sarana dan prasarana sudah cukup terlaksana dengan baik, karna semua para pelaksana program ini sudah lengkap dan bertanggung jawab. Untuk fasilitas sendiri dalam observasi yang dilakukan dilapangan penulis melihat bahwa masing-masing warga masyarakat penerima manfaat sudah memegang kartu mereka masing-masing. Hal tersebut juga dapat kita lihat dari beberapa jawaban dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan para pelaksanaksana yang bertanggung jawab dalam pengurusan program keluarga harapan ini.

Pembangunan melalui PKH dilakukan dengan meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada di Desa Serumpun Jaya. Program PKH dapat



dikatakan berjalan dan sukses apabila masyarakat mampu berpartisipasi dengan baik serta terdapat kemauan dan kesempatan yang dimiliki serta didukung dengan modal sosial yang dimiliki. Jika SDM memiliki kapasitas dan didukung modal sosial yang memadai, maka akan berdampak positif terhadap pembangunan desa melalui program PKH tersebut.

Sumber daya sangatlah penting bagi masyarakat untuk mengembangkan pola pikir masyarakat. Hal ini, juga dibutuhkan seorang pendamping untuk mengarahkan mereka bagaimana agar lebih berusaha mandiri untuk kedepannya. Mengingat kualitas SDM masyarakat di Kelurahan Sisir terutama ibu-ibu rumah tangganya masih jauh dari standart. Sehingga pendampingan yang intensif sangatlah perlu. Supaya penyaluran dana PKH dapat tepat sasaran, bukan hanya digunakan sebagai foya-foya atau untuk hal yang tidak seharusnya. Adanya kerjasama antara pendamping dengan masyarakat sangat berguna dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha kelompok bersama yang dilakukan dengan rutin. Harapannya peserta program keluarga harapan lebih berkembang dan lebih mandiri untuk kedepannya.

Berdasarkan hasil kuisioner, wawancara, observasi dan dokumentasi penulis menyimpulkan bahwasanya implementasi program keluarga harapan (PKH) dalam upaya mensejahterakan masyarakat (Studi Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu) dilihat dari indikator sumber daya dengan dua item penilaian yaitu sumber daya manusia dan fasilitas program keluarga harapan berada pada kategori “ cukup terimplementasi”.

### 3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan adalah faktor dalam pendekatan mengenai pelaksanaan kebijakan publik.

Pada pelaksanaan PKH tidak terlepas dari pihak-pihak yang terkait di dalamnya antara lain :

- 1) Tenaga Ahli adalah sumber daya manusia yang direkrut, diseleksi, dan ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga yang bertanggung-jawab dalam pelaksanaan PKH dan bertugas membantu Direktur yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan PKH mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan PKH.
- 2) Koordinator Wilayah PKH adalah sumber daya manusia yang direkrut, diseleksi, dan ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan PKH dan bertugas membantu kepala dinas/instansi sosial provinsi dalam mengkoordinir sumber daya manusia PKH di tingkat provinsi.
- 3) Koordinator Kabupaten/Kota PKH adalah sumber daya manusia yang direkrut, diseleksi, dan/atau direkomendasikan oleh Dinas/Instansi Sosial dan ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan PKH dan bertugas membantu kepala dinas/instansi sosial kabupaten/kota dalam dalam mengkoordinir sumber daya manusia PKH di tingkat kabupaten/kota.
- 4) Pendamping PKH adalah sumber daya manusia yang direkrut, diseleksi, dan ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan PKH dan bertugas melaksanakan tugas pendampingan di tingkat kecamatan.
- 5) Operator PKH adalah sumber daya manusia yang direkrut, diseleksi, dan ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan PKH dan bertugas mengumpulkan, memverifikasi,

mengolah dan mendistribusikan data PKH di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota.

Pada akhirnya implikasi positif dari pelaksanaan PKH harus bisa di buktikan secara empiris sehingga pengembangan PKH memiliki bukti nyata yang bisa dipertanggungjawabkan. Investasi di PKH sebagai investasi jangka panjang pembangunan manusia Indonesia dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan bangsa dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk mengetahui pelaksanaan disposisi dalam pelaksanaan program keluarga harapan di desa serumpun jaya, kecamatan pasir penyu, kabupaten indragiri hulu dapat dilihat data pada tabel berikut:

**Tabel V. 7: Tanggapan Responden Penelitian Masyarakat Anggota Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu**

No	Item Penilaian	Skala Pengukuran			Jumlah
		Baik	Cukup baik	Kurang baik	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Efek disposisi	13 (36%)	21 (58%)	2 (6%)	(100%)
2	Melakukan pengaturan birokrasi	15 (42%)	15 (42%)	6 (16%)	(100%)
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>36</b>	<b>8</b>	<b>72</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>14</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>36</b>
<b>Presentase</b>		<b>39%</b>	<b>50%</b>	<b>11%</b>	<b>100%</b>
<b>Skala Pengukuran</b>		<b>34-66%</b>			
<b>Kriteria</b>		<b>Cukup Terimplementasi</b>			

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa hasil penyebaran kuisioner dengan responden sebanyak 36 orang tersebut, ada responden yang menjawab baik sebanyak 14

orang dengan presentase sebesar 39% selanjutnya responden yang menjawab cukup baik sebanyak 18 dengan pesentase sebesar 50% kemudian yang menjawab kurang baik yaitu sebanyak 4 orang dengan pesentase 11% .

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Misbachul Ulum, St sebagai koordinator Kabupaten PKH pada tanggal 28 pukul 10.14 WIB mengenai indikator komunikasi, beliau mengatakan bahwa:

*“sikap yang ditunjukkan oleh keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan terutama di desa Serumpun Jaya baik terbukti dengan masyarakat penerima manfaat memenuhi komitmen sebagai penerima bantuan program keluarga harapan. Berikutnya dapat dibuktikan dari absensi kehadiran peserta didik disekolah serta kehadiran ibu hamil dan balita difasilitas kesehatan tinggi. Hal ini bearti menunjukkan bahwa masyarakat penerima manfaat memanfaatkan bantuan yang diberikan dari pemerintah ini dimanfaatkan dengan baik”.*

Selanjutnya wawancara dengan bapak Gusti Kancil S.E,Sy selaku pendamping PKH pada tanggal 27 September 2021 pukul 10.23 WIB didesa Serumpun Jaya yang mengatakan bahwa:

*“untuk sikap yang ditunjukkan tidak ada masalah semua masyarakat penerima manfaat program keluarga harapan semuanya mengikuti peraturan dan komitmen yang diberikan, mungkin hanya ada beberapa masyarakat saja yang kurang mengikuti aturan. Contohnya pada saat diadakan sosialisasi masih ada masyarakat yang tidak datang atau tidak mengikuti. Tapi untuk syarat sesuai yang ditentukan bagi masyarakat penerima manfaat alhamdulillah semuanya dipenuhi dan dipatuhi dengan baik oleh masyarakat penerima manfaat tersebut”.*

Kemudian wawancara dengan bapak jasrial selaku kepala desa di desa serumpun jaya pada pada tanggal 27 September pukul 09.30 WIB, beliau mengatakan bahwa:

*“saya selaku kepala desa masyarakat Serumpun Jaya melihat bahwa masyarakat penerima manfaat (KPM) dari program keluarga harapan Ini melaksanakan atau mengikuti apa yang diperintahkan sesuai dengan aturan yang berlaku di program tersebut. Salah satu contohnya yaitu di bidang pendidikan, insya Allah masyarakat saya yang mendapatkan bantuan ini anak-anak nya melanjutkan pendidikan semua. Contoh lain yaitu ibu hamil atau bumil rutin keposyandu untuk memeriksakan kehamilanya. Hal ini*

*berarti masyarakat desa Serumpun Jaya sudah memanfaatkan bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan di bidang pendidikan dan bidang kesehatan,. Walaupun mungkin masih ada satu atau dua orang yang memanfaatkan bantuan diluar hal-hal tersebut”.*

Dan yang terakhir wawancara yang dilakukan dengan bapak Agus Dwi Santoso selaku Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Masyarakat di Desa Serumpun Jaya pada tanggal 27 September 2021 pukul 11.05 wib, beliau mengatakan bahwa:

*“saya menilai masyarakat desa Serumpun Jaya yang mendapatkan bantuan program keluarga harapan ini alhamdulillah menunjukan sikap yang baik hal tersebut terbukti dengan menjalankan komitmennya sebagai masyarakat penerima manfaat. Contohnya anak-anak bersekolah semua. Kalaupun ada yang tidak sesuai komitmen mungkin ada satu atau dua orang yang dikatakan sudah tergolong mampu tetapi ia tidak mengundurkan diri dari anggota masyarakat penerima manfaat”.*

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis saat penelitian terlihat dari pelaksanaan indikator disposisi sudah dijalankan atau dilaksanakan mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa yang mengurus bagian bantuan sosial maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi tersebut terimplementasi dan terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis dilapangan dapat dilihat bahwa untuk indikator disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan dilapangan cukup terlaksana, hal ini dikarenakan masyarakat penerima manfaat (KPM) melaksanakan dan mengikuti setiap prosedur yang berlaku dalam program keluarga harapan, walaupun dari jumlah semua masyarakat Desa Serumpun Jaya yang mendapatkan bantuan program tersebut masih terdapat beberapa masyarakat yang mendapatkan bantuan tetapi mereka dapat dikategorikan masyarakat yang

mampu. Sehingga bantuan dari program ini yang diutamakan bidang kesehatan dan pendidikan akan tetapi karena hal tersebut sudah terpenuhi oleh beberapa masyarakat yang dianggap mampu ini jadi mereka menggunakan bantuan tersebut untuk hal-hal lain diluar kesehatan dan pendidikan. Hal tersebut hanya dapat diatasi oleh masyarakat yang mampu tersebut dengan kesadaran diri sendiri untuk mengundurkan diri dari anggota penerima manfaat dari bantuan program keluarga harapan ini.

Disposisi atau sikap didalam suatu pelaksanaan kebijakan merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena para pelaku kebijakan memiliki suatu keinginan, kemauan, dan kecenderungan untuk melaksanakan serta mewujudkan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh. Jika sikap atasan yang baik akan memberikan contoh terhadap bawahannya. Dalam hal ini juga harus diperlukan keseimbangan pandangan bahwa kebijakan dilaksanakan untuk memenuhi tujuan organisasi sehingga kebijakan menyentuh harapan yang sejatinya adalah mencapai tujuan.

Disposisi atau sikap sangat berpengaruh dalam melakukan kerjasama antara atasan, pendamping dan juga dengan masyarakat dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Jika suatu sikap yang baik akan berdampak positif bagi masyarakat ataupun sebaliknya. Pemerintah selaku pihak pelaksana program keluarga harapan kami juga berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat penerima program keluarga harapan. Untuk selalu berusaha menumbuhkan rasa kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu. Dengan dibantu seorang pendamping akan lebih mempermudah berjalannya pelaksanaan program keluarga harapan tersebut.

Selain itu, Pihak desa terus mengupayakan supaya peserta PKH selalu mendorong mereka untuk rutin dalam melaksanakan pertemuan, apalagi jika terdapat surat langsung dari Provinsi maupun Kota. Begitu juga halnya, yang dilakukan oleh pendamping PKH yang selalu tanggap dan memberikan pelayanan terbaik bagi peserta program keluarga harapan dengan selalu bersikap sabar, bersikap akrab, menghargai dan rendah hati. Pendamping juga yang akan turun langsung jika ada permasalahan yang dihadapi oleh peserta program keluarga harapan. Mengakomodasi segala jenis pengaduan yang terkait dengan pelaksanaan program keluarga harapan dan penanganan penyelesaiannya sebagai suatu proses dan itikad baik yang akan sangat bermanfaat bagi penyempurnaan dan kelancaran pelaksanaan program keluarga harapan.

Berdasarkan hasil kuisisioner, wawancara, observasi dan dokumentasi penulis menyimpulkan bahwasanya implementasi program keluarga harapan (PKH) dalam upaya mensejahterakan masyarakat (studi desa serumpun jaya, kecamatan pasir penyu, kabupaten indragiri hulu) dilihat dari indikator disposisi dengan dua item penilaian yaitu efek disposisi manusia dan melakukan pengaturan birokrasi berada pada kategori “ cukup terimplementasi”.

#### **4. Struktur birokrasi**

Struktur birokrasi adalah suatu susunan dan hubungan antar tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau lembaga dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Pelaksanaa PKH pusat dilakukan oleh

direktorat yang menangani pelaksanaan PKH pada Kementerian Sosial, yang bertugas sebagai berikut:

- 1) melaksanakan seluruh kebijakan pelaksanaan PKH meliputi penetapan sasaran, Validasi, terminasi, Bantuan Sosial PKH, kepesertaan, dan sumber daya;
- 2) Memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana
- 3) menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
- 4) membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk perluasan dan penyempurnaan program;
- 5) melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH; dan
- 6) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PKH kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

Selanjutnya pelaksanaan PKH dilakukukan pada tingkat provinsi yang dilakukan oleh koordinator wilayah sebagaimana dimaksud bertugas membantu kepala dinas sosial daerah provinsi dalam pelaksanaan PKH untuk:

- a. memastikan bisnis proses berjalan sesuai dengan ketentuan di tingkat daerah provinsi;
- b. memastikan aplikasi PKH dapat diakses dan dimutakhirkan di tingkat daerah provinsi;
- c. membangun jaringan kerja dengan pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi;
- d. pengelolaan penanganan Pengaduan di tingkat daerah provinsi;
- e. melaksanakan advokasi penyediaan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- f. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan dan kinerja sumber daya manusia PKH di tingkat daerah provinsi; dan
- g. memberikan penilaian kinerja koordinator daerah kabupaten/kota dan administrator pangkalan data di wilayah kerjanya.



Selanjutnya pada koordinator wilayah pada tingkat provinsi bekerjasama dengan koordinator daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud bertugas membantu kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan PKH, mengoordinasikan sumber daya manusia PKH di tingkat daerah kabupaten/kota, dan memberikan penilaian kinerja pendamping sosial, asisten pendamping sosial, dan administrator pangkalan data di wilayah kerjanya.

Selanjutnya Koordinator pelaksanaan PKH pada tingkat Kabupaten bekerjasama dengan pelaksanaan PKH pada tingkat kecamatan, adapun tugas pelaksanaan PKH pada tingkat kecamatan yaitu:

- a. Bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/desa/nama lain;
  - b. Melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa/nama lain;
  - c. Memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana;
  - d. Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH;
  - e. Membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH; dan
  - f. Melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH daerah kabupaten/Kota
- Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel data dibawah ini:

**Tabel V.8: Tanggapan Responden Penelitian Masyarakat Anggota Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu**

No	Item Penilaian	Skala Pengukuran			Jumlah
		Mampu	Cukup mampu	Kurang mampu	
1	2	3	4	5	6
1	Melaksanakan tugas sesuai SOP	13 (36%)	17 (47%)	6 (17%)	(100%)
2	Pelaksanaan tugas sesuai	11 (31%)	16 (44%)	9 (25%)	(100%)

tupoksinya				
<b>Jumlah</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>72</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>36</b>
<b>Presentase</b>	<b>33%</b>	<b>46%</b>	<b>21%</b>	<b>100%</b>
<b>Skala Pengukuran</b>	<b>34-66%</b>			
<b>Kriteria</b>	<b>Cukup terimplementasi</b>			

*Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2021*

Dari tabel diatas terlihat bahwa hasil penyebaran kuisioner dengan responden sebanyak 36 orang tersebut, ada responden yang menjawab baik sebanyak 12 orang dengan presentase sebesar 33% selanjutnya responden yang menjawab cukup baik sebanyak kurang lebih 16 orang dengan presentase sebesar 46% kemudian yang menjawab kurang baik yaitu sebanyak kurang lebih 8 orang dengan presentase 21% .

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Misbachul Ulum, St sebagai koordinator Kabupaten PKH pada tanggal 28 pukul 10.14 WIB mengenai indikator komunikasi, beliau mengatakan bahwa:

*“dari laporan yang diberikan oleh setiap tugas yang diberikan kepada pendamping program keluarga harapan semuanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan dapat mempertanggungjawabkan setiap tugas yang diberikan kepada masing-masing”.*

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis dilapangan maka penulis menyatakan bahwa pada indikator struktur birokrasi yang memiliki sub indikator pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya disini penulis melihat pada pelaksanaan kebijakan program keluarga harapan di desa serumpun jaya sudah atau dapat dikatakan mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Hal ini dapat penulis lihat juga dari tanggapan responden yaitu masyarakat penerima manfaat itu sendiri pada jawaban

kuisisioner yang diberikan bahwa para pelaksana kebijakan mampu melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan hasil kuisisioner, wawancara, observasi dan dokumentasi penulis menyimpulkan bahwasanya Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Studi Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu) dilihat dari indikator struktur birokrasi dengan dua item penilaian yaitu membuat SOP manusia dan pelaksanaan SOP berada pada kategori “ cukup terimplementasi”.

Selanjutnya untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan masyarakat penerima manfaat (KPM) mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya mensejahterakan masyarakat (studi Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel V.8: Rekapitulasi Tanggapan Responden Penelitian Dari Masyarakat Penerima Manfaat Terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu)**

No	Item Penilaian	Skala Pengukuran			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	2	3	4	5	6
1	komunikasi	24 (67%)	- (0%)	12 (33%)	36
2	Sumber Daya	15 (42%)	17 (47%)	4 (11%)	36
3	Disposisi	14 (39%)	18 (50%)	4 (11%)	36
4	Struktur Birokrasi	12 (33%)	16 (46%)	8 (21%)	36

<b>Jumlah</b>	<b>65</b>	<b>51</b>	<b>28</b>	<b>144</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>36</b>
<b>Presentase</b>	<b>45%</b>	<b>36%</b>	<b>19%</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2021*

Dari tabel V.8 rekapitulasi tanggapan responden masyarakat terhadap variabel implementasi diatas, untuk kategori penilaian terimplementasi yaitu sebesar 45%, untuk kategori cukup terimplementasi yaitu sebesar 36% dan untuk kategori kurang terimplementasi yaitu sebesar 19% dari total seluruh jumlah responden yaitu 36 orang. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu) dikategorikan “**Cukup Terimplementasi**” dengan total presentase sebesar 45%.

**C. Faktor Penghambat Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ( Studi Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu)**

Adapun yang menjadi hambatan-hambatan yang dilihat oleh penulis berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis beserta tanggapan responden dalam Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu), yaitu sebagai berikut:

1. Dalam setiap sosialisasi atau pertemuan yang dilakukan oleh para pengurus program keluarga dengan masyarakat penerima manfaat di desa serumpun jaya masih terdapat beberapa masyarakat yang tidak menghadiri sosialisasi , pertemuan ataupun diskusi yang dilakukan tersebut. Untuk itu baiknya

masyarakat memiliki rasa keasadaran agar pada setiap diadakan kegiatan baik sosialisasi, pertemuan maupun diskusi yang dilakukan semua masyarakat penerima manfaat di desa serumpun jaya agar dapat hadir, sehingga setiap informasi yang di berikan dapat diterima dan dipahami dengan baik.

2. Masih terdapat masyarakat penerima manfaat yang dikategorikan sudah mampu tetapi masih mendapatkan bantuan program keluarga harapan ini, begitupun sebaliknya, pada saat melakukan observasi dilapangan penulis juga melihat ada beberapa masyarakat yang dikatakan kurang mampu dan dianggap lebih pantas mendapatkan bantuan tersebut justru tidak menerima bantuan ini. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan kesadaran dari dalam diri masyarakat itu sendiri untuk mengundurkan diri dari anggota penerima manfaat agar masyarakat yang lain yang lebih layak bisa mendapatkan bantuan dari program keluarga harapan ini.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang menyangkut implementasi program keluarga harapan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (studi masyarakat desa serumpun jaya, kecamatan pasir penyu, kabupaten indragiri hulu) berdasarkan empat indikator yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk indikator komunikasi yang memiliki item penilaian yaitu sosialisasi mengenai persyaratan dan sosialisasi mengenai peraturan dari program keluarga harapan ini yang dilakukan oleh para pemerintah desa yang mengurus program ini, pendamping program keluarga harapan kecamatan pasir penyu dengan masyarakat penerima manfaat dari keseluruhan hasil yang didapatkan ialah terlaksana. Karna pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk tetap menjaga komunikasi antara pemerintah dengan peserta atau anggota program keluarga harapan (PKH). Setiap informasi yang ada selalu di informasikan kepada masyarakat penerima manfaat agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan program ini.
2. Untuk indikator sumber daya dengan item penilaian sumber daya manusia dan fasilitas dari keseluruhan hasil yang didapatkan ialah cukup terimplementasi. Hal ini karna ada beberapa kecamatan yang masih kurang dan membutuhkan pendamping program keluarga harapan, namun dalam

hal ini desa serumpun jaya tidak mengalami kekurangan sumber daya manusia dan untuk item fasilitas tidak mengalami masalah karena setiap anggota masyarakat penerima manfaat mendapatkan kartu ATM dan dipengang oleh masing-masing.

3. Untuk indikator disposisi berada pada kategori cukup terimplementasi. Karna baik pemerintah desa pengurus program keluarga harapan maupun pendamping PKH kecamatan Pasir penyus beserta pengurus program keluarga di dinas sosial melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Walaupun mungkin ada beberapa keasalahan yang dilakukan tetapi hal tersebut selalu teratasi dengan baik.
4. Untuk indikator struktur birokrasi berada pada kategori cukup terimplementasi. Karna semua kegiatan yang dijalankan dalam pelaksanaan kegiatan program ini sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin dan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti dari keseluruhan hasil yang telah didapatkan yaitu demi terimplementasinya program keluarga harapan ini dengan baik yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti mengharapkan kepada para petugas desa yang bertanggung jawab dalam program ini dan para petugas PKH yang ditanggung jawab oleh dinas sosial agar lebih teliti dan bersikap tegas dalam mendata ulang masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkan dan menerima dana

bantuan dari program keluarga harapan ini sehingga tidak terjadi kesalahan yang merugikan pemerintah.

2. Agar tujuan yang sesungguhnya yang diharapkan bisa tercapai dan berjalan dengan baik. Kemudian perlunya pengawasan ketat dari pemerintah tentang penggunaan dana yang digunakan peserta PKH, jika ada yang menggunakan dana diluar dari bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial diberikan sanksi atau dikeluarkan dari peserta penerima manfaat.
3. Sekiranya diharapkan kepada masyarakat penerima manfaat yang dikategorikan mampu agar dapat mengundurkan dari dari anggota program keluarga harapan sehingga masyarakat yang kurang mampu yang lebih pantas dapat menerima bantuan program ini.
4. Untuk para peneliti selanjutnya yang akan mengangkat topik yang sama dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap masalah yang diteliti.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino ,L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV.Alfabeta  
Jakarta : PT. Gramedia
- Nugroho,Riant. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*.
- Nugroho,Riant. (2013). *Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta : Pustaka Pelajar
- Nugroho,Riant. (2016). *Kebijakan Publik di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka  
Pelajar
- Purwanto E. W & Dyah Ratih (2015). *Implementasi Kebijakan Publik*.
- Siagian , S. (2006). *Administrasi pembangunan* . Jakarta : Gunung Agung.
- Siagian, S. (2003). *Filsafat Administrasi Publik*. Jakarta: Bumi aksara.
- Sondang P, S. (2014 ). *Administrasi Pembangunan* . Jakarta: PT. Bumi Aksara..
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafi'i, I. (2003). *Ilmu Administrasi Publik* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafri , W. (2012). *Studi Tentang Administrasi Publik* . Jakarta: Erlangga.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Truen RTH Bandung
- Tahir Arifin, (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan  
Pemerintah Daerah*. Jakarta : PT. Grafika Utama Jakarta
- Tahir, A. (2011). *Kebijakan Pubik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah  
Daerah*. Jakarta: PT Grafika Utama.
- Terry, G. (2012). *Dasar-dasar Manajemen*. Cetakan ke XIII. Jakarta: Bumi  
Aksara
- Winardi. (2010). *Asas-asas Manajemen*. Bandung: Gramedia. Yogyakarta : Gava  
Media

Zulkifli, & Nurmasari. (2015). *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.

Zulkifli, & Yogya, A. (2014). *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press

Zulkifli. (2005). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR press.

Zulkifli. (2009). *Fungsi-fungsi Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.

Zulkifli. (2013). *Buku Panduan Penulisan Usulan Penelitian Skripsi Dan Kertas Kerja Mahasiswa (KKM)*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Edisi Revisi 2013. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

### **Peraturan Dan Undang-Undang**

Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Peraturan Menteri Bidang Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Peraturan Menteri Bidang Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan,

Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.

Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

### **Jurnal dan Skripsi**

Guswati, Eka.”*Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu*”. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, UIR. 2011

Matualage, Priska A. “*Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kota Manado (Studi Kasus Di Kecamatan Tuminting)*”. Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP UNSRAT.

Pradikta, Eka Prastia Dan Indah Prabawati. “*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Kesehatan Di Desa Pulo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang*”. Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara, FISH, UNESA.

Suwinta, Antriya Eka Dan Indah Prabawati. “*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar*”  
Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara, FISH,UNESA. 2016.